

SKRIPSI

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

RUSDI
105 7304708 14



JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN ENREKANG**

**RUSDI
105 7304708 14**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan Studi
Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hai orang-orang yang beriman, Barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, Maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintaiNya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui.

(QS. Al-Maidah : 54)

MOTTO HIDUP

Hidup untuk Maha Hidup, Indah Bersama Makhluk Hidup, Agar Mati Tetap Hidup,
Maka Berkaryalah Selagi Masih Hidup.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Saya Persembahkan kepada seorang yang memiliki hati yang Anggun lagi Lembut yaitu:

Ibundaku Tercinta, Wahai Rabbi, jadikanlah dia berumur panjang & beramal baik
Ayahandaku Tercinta, Wahai Rabbi, jadikanlah dia berumur panjang & beramal baik
*“wahai Rabb-ku Rahmatilah Keduanya Sebagaimana Mereka Mendidikku Ketika
Aku Kecil.”* (QS. Al-Isra’: 24)

Dan Kaka-Kakaku tercinta, Semoga Allah mengumpulkan kita semua di Syurga
Firdaus Kelak, Insyaa Allah.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang

Nama : Rusdi

Nim : 10573 04708 14

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diajukan di depan Tim Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Jum'at, 31 Agustus 2018 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui

Pembimbing I

Drs. H. Hamzah Limpo, MS
NIDN : 0017075201

Pembimbing II

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NIDN : 090515880

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM : 1073 428



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

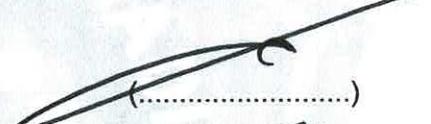
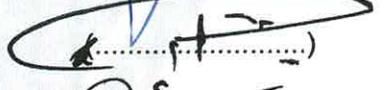
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **Rusdi**, NIM : **105730470814**, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : Tahun 1439 H/2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Dzulhijjah 1439 H
31 Agustus 2018 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM
 (Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
 (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim, HR, SE., MM
 (WD 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) 
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM 
 2. Dr. Andi Rustam, SE., MM.Ak.,CA.,CPA 
 3. Faidul Adzim, SE., M.Si 
 4. Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA., CSP 

Disahkan oleh,
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E., MM
NBM: 903 078



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rusdi
Stambuk : 105730470814
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,



Mengetahui,


Dekan Fakultas Ekonomi
Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Ketua Jurusan Akuntansi


Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak., CA., CSP
NBM : 1073 428

ABSTRAK

RUSDI, (2018). *“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang”*, dibimbing oleh Bapak H. Hamzah Limpo, dan Bapak Ismail Badollahi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektif realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kab. Enrekang, metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik dokumenter, survey dan observasi.

Hasil dari penelitian yang dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang mengenai Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), menunjukkan bahwa kinerja pendapatan belum mencapai target namun termasuk dalam kategori efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang dianggarkan. Sedangkan kinerja belanja pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien. Hal ini terlihat dari tidak adanya angka realisasi yang melebihi anggaran belanja yang ditargetkan.

Kata kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan Dan Belanja Daerah, Tingkat Efektif Pendapatan dan Efisien Belanja Daerah.

ABSTRACT

Rusdi, (2018). *"Analysis Of The Report On The Realization Of The Regional Income And Expenditure Budget In The District Government Of Enrekang "*, guided by Mr. H. Hamzah Limpo, and Mr. Ismail Badollahi, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar.

This study aims to determine the extent of the effectif of the realization of the regional income and expenditure budget in the district government. Enrekang, the analytical method used is a quantitative descriptive method using data collection techniques namely documentary techniques, surveys and observations.

Results of research conducted at the District Financial Management Agency of Kab. Enrekang regarding the Analysis of Regional Revenue and Expenditure Budget Realization Report (APBD), shows that revenue performance has not reached the target but is included in the category of effective this can be seen from the smaller amount realized with the budgeted. While the expenditure performance of the district government of the district. Enrekang is considered to be able to save budget spending very efficiently. This can be seen from the absence of realization figures that exceed the targeted budget.

Keywords: Budget Realization Report, Regional Revenue and Expenditure, Income Effectif and Regional Expenditure Efficien.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah milik Allah *subhanahu wa ta'ala*, Rabb semesta alam. Tiada kata yang paling indah selain berdzikir memuji-Nya. Karena berkat Rahmat, Pertolongan dan Hidayah-Nya dari-Nyalah sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kab. Enrekang” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam kepada suri tauladan kita nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wa sallam* yang telah membawa *rahmatan lilalamin*, juga kepada para sahabat, keluarga dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan agama ini hingga hari kiamat kelak.

Pengharapan yang setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya tak lupa penulis sampaikan kepada Bapak Drs.H. Hamzah Limpo,MS, selaku pembimbing I dan Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.SI.AK.CA selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. Dan juga ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda yang penulis cintai yang merawat penulis penuh kesabaran dan mendidik penulis dari kecil hingga sekarang dan senantiasa mendoakan penulis dan juga bagi saudara-saudari penulis yang selalu menjadi penyemangat dalam segala aktivitas dan pemberi dukungan baik moril maupun materil.

Dengan kemampuan dan pengetahuan yang sangat terbatas, maka penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan skripsi ini masih jauh dari nilai kesempurnaan yang disebabkan beberapa hal berkaitan dengan hal-hal yang ikut mempengaruhi penyusunan dan penulisan skripsi ini. Namun berkat bimbingan, bantuan dan arahan dari berbagai pihak, akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana SI pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK. CA selaku ketua jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Hamzah Limpo, MS, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si., AK. CA, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah membantu kegiatan penulis dan pemberian ilmunya dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Drs. A. Ullung Tiro R, MM selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Rekan-rekan kuliah terkhusus kelas akuntansi 02-2014 atas persaudaraan yang terjalin dan kenangan yang tak terlupakan disaat kebersamaan selama kuliah.
10. Untuk para pejuang agama Allah *Subhanahu wa ta'ala* Ikhwa LDK-LPKSM Makassar *Syukran wa jazakumullahu khairan* dan teruslah berjuang memperjuangkan agama Allah di muka bumi ini karena kita yakin dengan janji-Nya yakni Jannatul Firdaus, *ana uhibbukum fillah*.
11. Untuk para pejuang agama Allah *Ta'ala* di Forum Daerah Ikhwa dan Akhwat Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim Massenrempulu Enrekang (FKM3 Enrekang) atas terjalinnya ukhuwah dan kerjasama dalam mengusung dakwah di daerah serta dukungan, motivasi dan do'a untuk menyelesaikan studi yang penulis tidak sempat sebut satu per satu dalam penulisan skripsi ini.

Berbagai usaha dan upaya yang telah penulis lakukan dalam penyelesaian skripsi ini dengan sebaik mungkin, namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa

skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan terutama bagi diri penulis sendiri. Sekian dan terimakasih.

Makassar,....Syawal 1439 H
Juni 2018 M

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Akuntansi Sektor Publik	10

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)	13
C. Laporan Keuangan Daerah	19
D. Laporan Realisasi Anggaran	20
E. Kinerja Keuangan Daerah	21
F. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah	23
G. Penelitian Terdahulu	27
H. Kerangka Konsep	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Definisi Operasional	34
D. Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisis	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	40
1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang	40
2. Struktur Organisasi BPKD Kab. Enrekang	41
3. Visi dan Misi BPKD Kab. Enrekang	43
4. Kedudukan, Fungsi dan Uraian Tugas BPKD Kab. Enrekang	43
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang	71
C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	77
D. Perhitungan dan Analisa Rasio Efektivitas Pendapatan dan Belanja	

Daerah	83
E. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan dan Belanja	
Daerah	95
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	101

DAFTARTABEL

TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
Tabel 1.1	Laporan Anggaran Pendapatan Dan Realisasinya	6
Tabel 1.2	Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasinya	7
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Nilai Efektivitas PAD Secara Umum	38
Tabel 3.2	Nilai Efisiensi Belanja Daerah Secara Umum	39
Table 4.1	Ringkasan Laporan Realisasi PAD T.A 2015-2017	72
Tabel 4.2	Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Transfer T.A 2015-2017	73
Tabel 4.3	Ringkasan Laporan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah T.A 2015-2017	74
Tabel 4.4	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Operasi T.A 2015-2017	75
Tabel 4.5	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Modal T.A 2015-2017	76
Tabel 4.6	Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga T.A 2015-2017	77
Tabel 4.7	Ringkasan laporan realisasi anggaran 2015	78
Tabel 4.8	Ringkasan laporan realisasi anggaran 2016	80
Tabel 4.9	Ringkasan laporan realisasi anggaran 2017	81

Tabel 4.10	Kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD	83
Tabel 4.11	Kriteria tingkat efisiensi Belanja secara umum	84
Tabel 4.12	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Tahun 2015	85
Tabel 4.13	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Tahun 2016	87
Tabel 4.14	Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Tahun 2017	90
Tabel 4.15	Rasio Efektivitas Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah Keb. Enrekang T.A 2015-2017	92
Tabel 4.16	Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kab. Enrekang T.A 2015-2017	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	<i>Value For Money (VFM)</i> Secara Skematis	11
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	33
Gambar 4.1	Struktur Organisasi BPKD	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran merupakan salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program atau agenda. Sebelum merealisasikan suatu program, sangat dibutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai tujuan dari program tersebut. Salah satunya adalah anggaran. Di lingkungan pemerintah maupun sektor publik anggaran merupakan alat untuk mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai pada suatu periode tertentu. Anggaran pada lingkungan sektor publik adalah sesuatu yang rumit, berbeda dengan sektor swasta yang merupakan sasaran utamanya adalah mencari laba atau keuntungan, pada sektor swasta, anggaran merupakan hal yang dirahasiakan, namun hal ini tidak berlaku pada sektor publik, anggaran yang telah disusun harus diinformasikan kepada publik untuk dievaluasi dan di perbaiki pada periode yang akan datang, sehingga dengan adanya transparansi ini membuat pemerintah dapat melakukan reformasi dalam hal administrasi publik, termasuk pula pada sistem anggaran. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh dewan perwakilan rakyat daerah, (Muindro Renyowijoyo 2012:54).

Pengaturan pada aspek perencanaan diharapkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan

partisipasi masyarakat sehingga bisa menciptakan ekonomis, efektif dan efisien dalam menggunakan belanja daerah dengan *output* dan *income* yang jelas sesuai dengan prioritas pembangunan sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparansi kepada masyarakat luas. Dalam *line item budgeting* pengeluaran-pengeluaran yang tidak terukur secara jelas jumlah yang dikeluarkan, hanya sebatas pada penambahan dan pengurangan anggaran berdasarkan anggaran pada tahun sebelumnya dan tidak adanya standar biaya yang jelas menyebabkan anggaran biaya ini kurang objektif dan rawan dimanipulasi.

Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk organisasi sektor publik yang mengatur jalannya pemerintah pada daerah tersebut, sebagai sektor publik pemerintah daerah harus menyediakan layanan jasa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya, termasuk pada pengelolaan keuangan daerah dan menggunakan hasil dari pengelolaan tersebut untuk memaksimalkan potensi yang ada dan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Agar mampu menjalankan perannya, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraann pemerintah Negara (Muindro Renyowijoyo, 2012).

Adanya desentralisasi pada pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, maka pemerintah harus menyelenggarakan sistem pengelolaan keuangan yang dapat meningkatkan ekonomis, efektif dan efisien kinerja serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan dan

bertanggungjawab. Program yang disusun berdasarkan anggaran kinerja prioritas yang berkaitan erat dengan visi, misi dan rencana strategis yang ingin dicapai. Sehingga hasil (*outcomes*) yang dicapai mencerminkan visi, misi suatu organisasi. Komponen anggaran berbasis kinerja adalah indikator kinerja, standar biaya dan pengukuran kinerja. Ketiga hal tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menilai *input*, *output* dan *outcomes* suatu program yang disusun berdasarkan kinerja untuk meningkatkan efektif dan efisien kinerja. Apabila efektif dan efisien kinerja telah tercapai maka akan tercipta akuntabilitas kinerja yang merupakan visi dari seluruh organisasi sektor publik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dien et al, (2015:534) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah berpengaruh terhadap efektif dan efisien penggunaan anggaran keuangan. Hal ini ditunjukkan bahwa semakin efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dan belanja daerah maka kinerja keuangan daerah pun semakin tinggi peningkatan kinerjanya. Sedangkan peneliti yang lain menemukan bahwa kinerja pendapatan belum efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasikan dengan yang dianggarkan. Adapun dengan kinerja belanja pada pemerintah daerah sudah efektif hal ini didukung dengan kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penghematan dan melakukan peningkatan PAD dan disertai dengan penghematan belanja (Maechelino Daling, 2013:82).

laporan anggaran pendapatan dan belanja daerah harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena pada

dasarnya laporan keuangan daerah adalah bagian dari sistem keuangan Negara. yang setiap tahunnya tidak selamanya anggaran yang direalisasikan mengalami kenaikan atau penurunan yang signifikan. Sebagaimana penelitian Tenda M.V.S., et al. (2014;638) menemukan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak terjadi penurunan dan kenaikan yang signifikan, khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja infrastruktur, jalan dan imigrasi. Terjadi surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi. Sebaliknya kepala daerah meningkatkan dari realisasi anggaran belanja daerah sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah yang dikelolanya.

Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilitas, distribusi, alokasi sumber daya publik, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Oleh karena itu laporan realisasi anggaran menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang paling utama. Penelitian tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah di pemerintah daerah sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti seperti analisis anggaran dan realisasi kegiatan keuangan pada dinas pendidikan provinsi Kalimantan selatan (Wahyu Saptono Rini, 2016), Analisis laporan realisasi anggaran dengan menggunakan rasio efektif dan rasio efisien pada kantor badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang (Rukayah, 2017) dan analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai gersik (Elly Hersrini, 2015).

Pengukuran tingkat efektif dan efisien laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sangat penting untuk menilai transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam memanfaatkan anggaran keuangan daerah. Agar pemerintah daerah dapat menunjukkan kemampuan dalam membelanjakan dan merealisasikan APBD secara efektif dan efisien.

Anggaran Pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrument kebijakan yang sangat penting yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berupaya secara transparan dan akuntabilitas dalam meningkatkan kinerja guna dapat memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara efektif dan efisien. Efektif pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektif merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*) dan apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%.. Indikator efektif menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program (Mardiasmo 2009:132). Sedangkan pengukuran efisien dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan prnggunaan sumber daya dan dana yang serendah–rendahnya (*spending well*). Dengan demikian APBD merupakan

sarana untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui kegiatan dan program yang telah melalui perumusan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang manfaatnya harus benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat.

Berikut ini adalah data anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah Kab. Enrekang.

Tabel 1.1
Laporan Anggaran Pendapatan Dan Realisasinya
Pemerintah Daerah Keb. Enrekang T.A 2015-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentasi (%)	Analisis Efektif
2015	946.648.050.605,00	919.862.386.647,46	97,17	Eektif
2016	1.103.986.718.250,00	1.032.816.629.667,45	93,55	Efektif
2017	1.057.719.428.195,00	1.000.853.540.078,55	94,62	Efektif

Sumber: data diolah penulis (2018)

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektif anggaran pendapatan pada pemerintah daerah kab. Enrekang pada tahun 2015-2017 dinilai sudah efektif dalam mengelola anggaran pendapatan yaitu sebesar 97,17%, 93,55% dan 94,62%. Tingkat efektif yang paling tinggi tercapai pada T.A 2015 yaitu dengan persentase sebesar 97,17%.

Tabel 1.2
Laporan Anggaran Belanja Dan Realisasinya
Pemerintah Daerah Keb. Enrekang T.A 2015-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rata-Rata	Persentasi (%)	Analisis Efisien
2015	1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00	73,92%	26,08%	Sangat efisien
2016	1.206.155.278.726,00	1.091.335.511.816,00	84,87%	15,13%	Sangat efisien
2017	1.094.641.986.176,00	988.755.388.102,00	58,95%	41,05%	Sangat efisien

Sumber: data diolah penulis (2018)

Hasil penelitian rasio efisien belanja pada pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai sangat efisien karena pemerintah daerah Kabupaten Enrekang telah mampu mengelola anggaran secara hemat untuk tahun anggaran 2015-2017 hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja kabupaten Enrekang yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Rasio efisien dalam penggunaan anggaran belanja T.A 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebesar 26,08%; 15,13%; dan 41,05%.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten Enrekang karena Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang merupakan salah satu pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan otonomi daerah, yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh pemerintah pusat untuk mengelola keuangannya sendiri dan untuk mengetahui apakah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang telah merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara Efektif dan Efisien. Disamping itu penelitian tentang APBD pada kabupaten Enrekang masih jarang dilakukan oleh peneliti-peneliti

sebelumnya. Hal inilah yang menjadikan peneliti termotivasi untuk dilakukannya penelitian pada pemerintah Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan pada pembahasan terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang telah dibahas dalam latar belakang terdahulu, maka rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini adalah “Sejauhmana tingkat efektif dan efisien pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang”?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan terdahulu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat efektif dan efisien Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Darah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai

sumber informasi teoritis dan empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

2. Manfaat Praktisi

a. Bagi penulis

menambah wawasan dan peningkatan kapasitas penulis dalam bidang akuntansi sektor publik khususnya tentang kinerja keuangan pada pemerintah daerah, serta untuk membandingkan teori yang didapat dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

b. Bagi pemerintah daerah

sebagai tambahan bahan referensi dan bahan masukan dalam menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dan alternatif untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara efektif dan efisien demi tercapainya keberhasilan otonomi daerah.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat tentang kinerja keuangan dan tingkat realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana masyarakat oleh pemerintah daerah.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Akuntansi Sektor Publik

Pengertian akuntansi sektor publik Menurut Muindro Renyowijoyo (2012:1). "Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik". Sekarang terdapat perhatian yang makin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non pemerintahan Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggung jawab.

Organisasi sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial dan manfaat bagi publik, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat diterima sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu proses yang relatif kecil. Saat ini sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan.

1. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada wilayah publik. Wilayah publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kelompok dibandingkan dengan sektor

swasta/komersial. Secara kelembagaan wilayah publik antara lain meliputi organisasi laba non pemerintahan dan organisasi non laba non pemerintahan. Organisasi pemerintahan adalah badan-badan pemerintahan (Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit-unit kerja pemerintah lainnya seperti yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi politik dan lain sebagainya).

Sistem akuntansi untuk badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat, Kementrian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah, harus mengikuti standar pemerintah (SAP) seperti dimaksudkan dalam UU No 17/2003 Pasal 32 Tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 Pasal 51 ayat (3) Tentang Pemerintah Daerah.

2. *Value For Money (VFM)*

“Tuntutan baru (transparasi dan akuntabilitas) dalam organisasi sektor publik harus memperhatikan *value for money (VFM)* dalam menjalankan aktivitasnya. *VFM* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektif”. (Muindro Renyowijoyo, 2012:04)

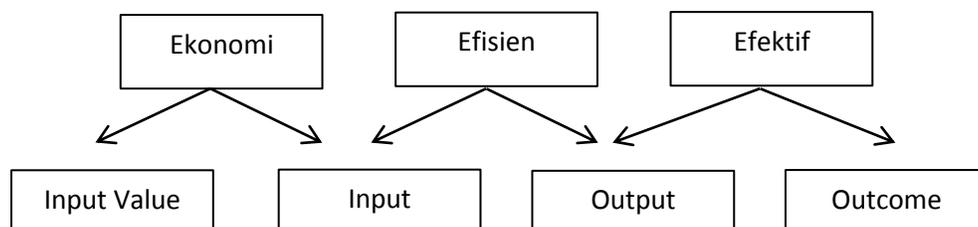
Ekonomi adalah perolehan masukan (*Input*) dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan (yang terjadi) dengan nilai masukan (yang seharusnya). Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir sumber daya yang digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisien, merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran/ masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektif, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana, efektif merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Ketiga hal tersebut merupakan elemen pokok *VFM*, sedangkan tambahannya dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (*social opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*). Penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

Gambar 2.1

Gambar Value For Money (VFM) Secara Skematis



Sumber: (Muindro Renyowijoyo, 2012:05)

B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1. Pengertian APBD

Dalam Undang-undang No.32 tahun 2014, Tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”. Sedangkan menurut Bastian (2006:189), “APBD merupakan pengejawantahan rencana kerja PEMDA dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik”.

Menurut, (Widjajanta, Widyaningsih, & Tanuatmodjo, 2014:20) dalam bukunya Ekonomi dan Akuntansi “APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Selain itu menurut Mahsun (2013:145), menyatakan bahwa “anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter”. (Dien, Tinangon, & Stanley, 2015) anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan berbagai program kedalam perencanaan keuangan tahunan yang lebih konkret. Ulasan anggaran pada umumnya ditelaah atau direview terlebih dahulu oleh pejabat yang lebih tinggi untuk bisa dijalankan anggaran formal. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengerahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin keseimbangan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Perencanaan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi. Demikian juga, anggaran mempunyai posisi sangat penting, anggaran mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa depan. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berpikir tentang pengintegrasian aktivitas kearah tujuan organisasi. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi, dan ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun strategi. Pemikiran strategis manajemen didokumentasikan dalam berbagai dokumen perencanaan. Keseluruh proses diintegrasikan dalam prosedur penganggaran organisasi.

Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan pemikiran dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Di dalam tampilannya, anggaran selalu menyerahkan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Kebanyakan organisasi sektor publik melakukan pembedaan krusial antara penambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran, dampaknya adalah pemisahan penyusunan anggaran tahunan dan anggaran modal tahunan.

Jenis anggaran sektor publik, menurut Indra Bastian (2006:164) adalah

- a. Anggaran Negara dan Daerah APBN/APBD *Budget of state*)
- b. Rencana kegiatan dan anggaran perusahaan (RKAP), yaitu anggaran usaha setiap BUMN/BUMD serta badan hukum publik atau gabungan publik-swasta.

Menurut *National comitte on governmental accounting (NCGA)* yang saat ini telah menjadi *governmental accounting standards board (GASB)*, (2006:163)

didefinisikan anggaran (*budget*) yaitu, Rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Pendapatan daerah adalah “semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”, (Undang-undang No.32 tentang pemerintah daerah)

Pendapatan daerah adalah “hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pemerintah daerah. Bagi pemerintah daerah penerimaan kas dari sumber pendapatan tersebut telah memenuhi definisi pendapatan, karena (1) ada penerimaan uang oleh pemerintah daerah (direkening kas umum daerah); (2) penerimaan tersebut merupakan hak pemerintah daerah untuk menerimanya; (3) uang yang sudah diterima tersebut tidak akan dibayar kembali oleh pemerintah daerah”, (Margono, 2010;25)

Menurut Margono dalam buku “*Akuntansi Keuangan Daerah*, (2010:25). “Belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum Negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Belanja daerah dapat dikelompokkan kedalam belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan rincian

jenisnya, belanja operasi terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bagi hasil.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi; antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangna pemerintah daerah.

2. Fungsi APBD

Menurut (Widjajanta et al., 2014:20) fungsi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah sebagai berikut:

- a. Fungsi otorisasi, yaitu anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,
- b. Fungsi perencanaan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan,
- c. Fungsi pengawasan, yaitu anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

- d. Fungsi alokasi, yaitu anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisien dan efektif perekonomian.
- e. Fungsi distribusi, yaitu anggaran daerah harus memerhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
- f. Fungsi stabilisasi, yaitu anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

3. Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Menurut (Widjajanta et al., 2014:22) dalam bukunya Ekonomi dan akuntansi, “proses penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)”. Yaitu,

APBD disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada rencana pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara. Dalam hal anggaran yang diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam peraturan daerah, sebaliknya, anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah.

Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun berikut sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan

oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD. Pemerintah daerah membahas bersama DPRD prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah tahun berikutnya berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan perkiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun berikutnya. Pemerintah daerah mengajukan rancangan APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun selanjutnya.

Pembahasan rancangan APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang

disetujui oleh DPRD terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Jika DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya.

C. Laporan Keuangan Daerah

Menurut ikatan akuntansi Indonesia (standar Akuntansi Keuangan, 2009:27) diungkapkan, "Laporan keuangan merupakan bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara, misalnya: sebagai laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan dan laporan serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dan laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga".

Pengertian laporan keuangan menurut peraturan menteri keuangan, "laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan".

Dari kedua pernyataan diatas, dilihat adanya perbedaan pada komponen laporan keuangan. Pada laporan keuangan non konvensional terdapat laporan

yang dinamakan laporan laba rugi, laporan tersebut berfungsi sebagai tolak ukur kinerja perusahaan, sedangkan pada laporan keuangan pemerintah pusat tidak terdapat laporan laba rugi, hal ini dikarenakan pemerintah tidak berorientasi pada profit, tetapi didalam laporan keuangan kementerian Negara/ lembaga ada laporan yang memperlihatkan jumlah anggaran yang diotorisasikan dengan realisasinya, laporan ini disebut realisasi anggaran. Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang sangat penting untuk mengetahui dan menganalisa keadaan dari suatu perusahaan dan dari hasil analisa disebut dapat diperoleh keputusan yang tepat.

D. Laporan Realisasi Anggaran

1. Definisi Laporan Realisasi Anggaran

"Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan selisih antara sejumlah yang digambarkan dalam APBD di awal periode dengan jumlah yang telah direalisasikan dalam APBD di akhir periode", (Indra Bastian, 2006:387).

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang.

2. Tujuan Laporan Realisasi Anggaran

Adapun tujuan penyusunan laporan realisasi anggaran yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisien dan keadilan

dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan dan memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas dalam belanja.

3. Manfaat Laporan Realisasi Anggaran

Adapun manfaat penyusunan laporan realisasi anggaran menurut , (standar akuntansi pemerintah 2007:85) yaitu, dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

E. Kinerja Keuangan Daerah

Menurut peraturan menteri dalam negeri No.13 (2006:5), Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan dan program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kuantitas yang terukur.

Laporan kinerja keuangan atau disebut juga dengan laporan pendapatan dan biaya laporan surplus-rugi, laporan operasi, laporan surplus-defisit, atau

laporan *profit* dan *lost* adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu (Indra Bastian,2006;248).

Menurut Indra Bastian (2006;248) Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut:

- a. Pendapatan dari aktivitas operasi;
- b. Surplus atau defisit dari aktivitas operasi;
- c. Biaya keuangan (biaya pinjaman);
- d. Surplus atau defisit neto saham dari asosiasi dan *joint venture* yang menggunakan metode ekuitas;
- e. Surplus atau defisit dari aktivitas biasa;

Indikator Kinerja keuangan menurut Indra Bastian (2006;267) adalah “ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outcomes*), manfaat (*benefits*), dan dampak (*impacts*)”.

- a. Indikator masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b. Indikator keluaran, yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan atau nonfisik.
- c. Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah.
- d. Indikator manfaat adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.

- e. Indikator dampak, yaitu pengaruh yang dapat menimbulkan baik positifnya maupun negatif terhadap setiap kegiatan indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan.

Indikator kinerja keuangan juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja keuangan yaitu:

- a. Spesifik, jelas, dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi,
- b. Dapat diukur secara objektif baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c. Relevan, yaitu kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
- d. Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
- e. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f. Efektif, yaitu data dan informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

F. Analisis Pendapatan dan Belanja Daerah

Analisis pendapatan dan belanja daerah secara umum dapat terlihat dari laporan realisasi anggaran. Melalui laporan realisasi anggaran, kita dapat melakukan analisis pendapatan untuk menilai efektif dan efisien, sejauh mana pemerintah daerah melakukan efisien anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan mengeluarkan yang tidak tepat sasaran. Kinerja anggaran

pendapatan dan belanja daerah dinilai baik apabila realisasi belanja lebih rendah dari jumlah yang dianggarkan dan hal itu menunjukkan efisien belanja. Dalam hal belanja daerah penting juga dianalisis keserasian belanja karena hal itu terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilitas.

Berdasarkan informasi dari laporan realisasi anggaran belanja, dapat dianalisis kinerja belanja dengan beberapa analisis sebagai berikut: (Abdul Halim, 2011).

1. Analisis Selisih Anggaran Pendapatan

Analisis selisih anggaran pendapatan dilakukan dengan cara menghitung selisih antara realisasi anggaran pendapatan dengan yang dianggarkan. Dalam analisis selisih anggaran pendapatan, pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan. Sebaliknya apabila realisasi anggaran pendapatan dibawah jumlah yang dianggarkan, maka hal itu dinilai kurang baik. Apabila target pendapatan dapat dicapai bahkan terlampaui, maka hal itu tidak terlalu mengejutkan karena memang seharusnya demikian. Tetapi target pendapatan tidak tercapai, hal ini butuh telaah yang lebih lanjut terkait dengan penyebab tidak tercapainya target.

2. Analisis Derajat Desentralisasi

Derajat dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi

PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

3. Efektif dan Efisien Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektif keuangan daerah otonomi (Selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektif menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Abdul Halim 2007:169).

4. Analisis Selisih Belanja

Analisis selisih belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, maka dapat diketahui secara langsung varians belanja antara anggaran belanja dan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Kinerja pemerintah daerah dapat dinilai baik jika realisasi belanja lebih kecil dari yang dianggarkan, jika sebaliknya maka mengindikasikan kinerja yang kurang baik (Abdul Halim, 2011).

5. Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja sangat bermanfaat untuk mengetahui pertumbuhan belanja dari tahun ke tahun positif atau negatif. Pada umumnya belanja memiliki kecendrungan untuk selalu naik. Alasan kenaikannya

biasanya dikaitkan dengan penyesuaian inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan biaya harus diikuti dengan pertumbuhan pendapatan yang seimbang.

6. Analisis Efisien Belanja

Analisis efisien belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisien ini tidak absolut, tetapi relatif. Kita hanya dapat mengatakan bahwa tahun ini belanja pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisien kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan telah terjadi pemborosan anggaran.

7. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan dapat digunakan untuk mengetahui pola anggaran pemerintah daerah. Juga dapat digunakan untuk membaca kebijakan pemerintah daerah. Salah satu pos yang paling urgen analisis pembiayaan ini adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA). Makin besar SILPA yang diperoleh dari suatu anggaran padat dijadikan salah satu indikator kurang tepatnya penyajian suatu rencana anggaran.

8. Analisis Keserasian Belanja

Analisis ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja yang digunakan untuk menyediakan sarana dan

prasarana, maka porsi untuk ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Analisis belanja meliputi:

- a. Rasio belanja rutin dan belanja pembangunan terhadap total belanja;
- b. Rasio belanja operasi terhadap total belanja;
- c. Rasio belanja modal terhadap total belanja;
- d. Rasio belanja langsung dan tidak langsung terhadap total belanja;

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mengenai realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang kemudian menjadi referensi yang relevan dengan penelitian ini antara lain dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Astria Nur Jannah Dien Jantje Tinangon Stanley Walandouw (2015)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung	Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektif dan efisien	Hasil penelitian diperoleh bahwa tingkat dan kriteria efektif penerimaan PAD di Dinas Pendapatan Kota Bitung Tahun Anggaran 2009-2013 sangat efektif, namun tingkat kriteria efisien anggaran dan belanja secara keseluruhan kurang efektif dikarenakan pengguna anggaran belanja yang terlalu

				tinggi.
NO	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Marchelino Daling (2013)	Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara	Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif	Hasil penelitian ini adalah peneliti menyimpulkan bahwa kinerja pendapatan cukup efektif hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah yang terealisasi dengan yang telah dianggarkan yaitu dengan rata sebesar 97,71%. Sedangkan untuk kinerja belanja sudah efektif hal ini dapat dilihat dari kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan sehingga Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melakukan penghematan dan berdampak pada adanya SILPA Surplus.
3.	Mirki Vici S. Temda Harijanto Sabijono Victorina Z. Tirayoh (2014)	Analisis Realisasi Anggarran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif	Laporan realisasi anggaran belanja pemerintah kota manado tahan 2010-2-12 tidak terjadi penurunan atau kenaikan yang

		2012		signifikan khususnya pada belanja bantuan sosial, belanja hibah, dan belanja infrastruktur, jalan dan irigasi, dan dikatakan surplus karena anggaran yang diterima lebih besar dari pada anggaran realisasi. dan realisasi anggaran pemerintah kota manado sudah efektif dan efisien karena mampu melihat prioritas anggaran terhadap masyarakat.
4.	Andre P. tulangow Treesje Runtu (2016)	Analisis realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah kabupaten minahasa	Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif	Hasil penelitian pada kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa belum terlalu baik dalam merealisasikan pendapatan daerahnya. Berbeda dengan belanja daerah, dalam tiga tahun penelitian pemerintah kabupaten Minahasa sudah baik dalam merealisasikan belanja dengan tidak melebihi dengan jumlah yang dianggarkan.

5.	Elly Hesrini (2015)	Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Dan Cukai Gresik	Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif	Penelitian ini menunjukkan kejelasan hubungan antara alokasi anggaran dengan keluaran atau hasil dari kegiatan atau program, dan kejelasan penanggung jawab pencapaian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektif penggunaan anggaran secara terukur.
NO	Nama Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Rukayah (2017)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektif Dan Rasio Efisien Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Serang	Metode penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif	Efektif badan perijinan terpadu dan penanaman modal kabupaten serang tahun anggaran 2014 – 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efektifnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam kriteria sangat efektif. Dan pada rasio efisiennya dilihat dari perhitungan rata-rata rasio efisiennya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam kriteria kurang efisein.
7.	Anastasia Friska	Analisis kinerja	Metode	Kinerja belanja

	Palilingan (2015)	belanja dalam laporan realisasi anggaran (LRA) pada dinas pendapatan kota manado	penelitian ini menggunakan metode evaluasi	pemerintah kota manado dilihat dari dari analisis varians secara umum kinerja pemerintah kota manado dapat dikatakan baik karena realisasi belanjanya tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana persentasenya rata-rata sebesar 90,75%
8.	Lidia M. Mawikere (2015)	Analisis penyajian laporan realisasi anggaran pada dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi utara.	Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif	Menunjukkan bahwa laporan keuangan khususnya belanja tidak langsung dinas energi dan sumber daya mineral provinsi Sulawesi utara sudah diakui karena sudah terjadinya pengeluaran kas daerah dan telah direalisasikan dalam laporan perubahan anggaran belanja tidak langsung satuan kerja perangkat daerah.
9.	Inggriani Elim (2015)	Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan	Metode penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif	Dari hasil perhitungan rasio efisien belanja, maka dapat dilihat T.A 2013-2014 pemerintah kota kotamobagu dapat melakukan penghematan

		Keuangan Dan Aset Daerah Di Kota Kotamobagau		anggaran sebesar 12,73%.
10	Abdurrahman Wiro Handoko (2014)	Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya	Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa anggaran yang sudah digunakan oleh dinas pendapatan kota Surabaya dengan baik, sehingga selisih tersebut dapat dilihat kinerja dinas pendapatan kota Surabaya telah mencapai hasil yang baik juga.

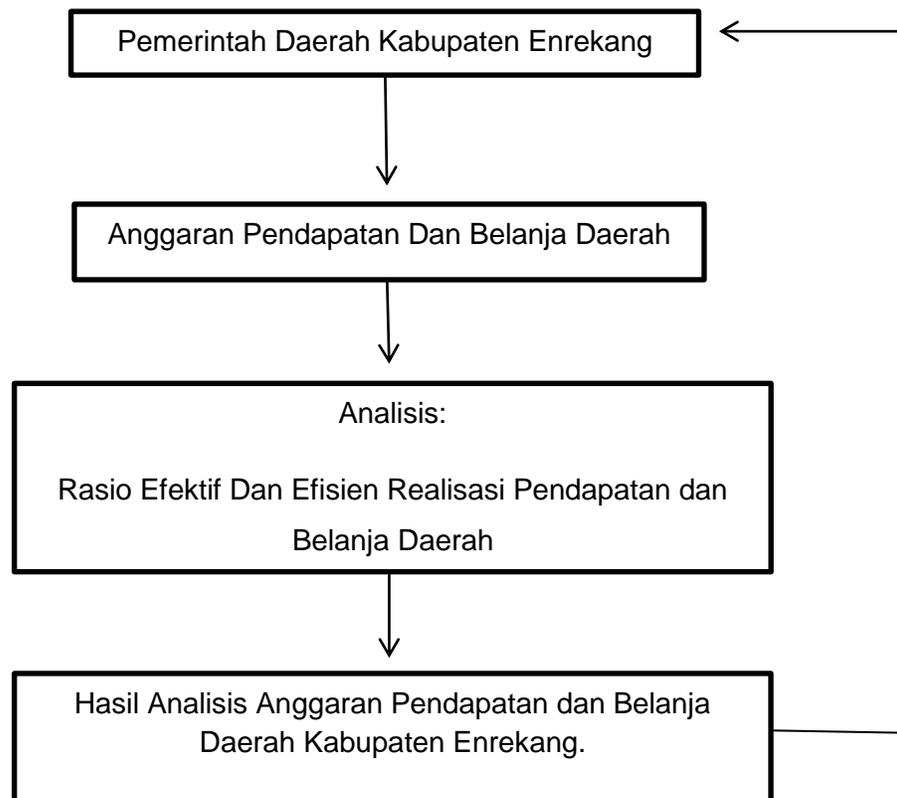
H. Kerangka Konsep

Dalam Penelitian Ini, Penulis Meneliti Tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan

peraturan daerah. Dan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai pendapatan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Serta belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat kualitas berupa efektif dan efisien atau kinerja perencanaan program yang telah dicapai, dengan menggunakan rasio keuangan yaitu rasio efektif pendapatan dan efisien belanja yaitu untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merealisasikan APBD yang ada dengan jumlah dan waktu yang tepat dan rasio efisien belanja yaitu untuk mengukur tingkat penghematan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka digunakan alur dari kerangka konsep penelitian dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.2
Kerangka Konsep

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif Kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk memperoleh gambaran dan karakteristik mengenai keadaan yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data berupa laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang mulai tahun 2015 sampai tahun 2017.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian untuk memperoleh data adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang, Jl. Jendral Sudirman No. 1 Enrekang Sulawesi Selatan. Penelitian ini fokus pada anggaran pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten Enrekang, yaitu tahun anggaran 2015-2017.

2. Waktu Penelitian

Pengambilan data pada penelitian ini diperkirakan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan yaitu mulai bulan April 2018 sampai bulan Juni 2018.

C. Definisi Operasional

1. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu dimasa yang akan datang.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Belanja daerah, adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab kepada masyarakat dan pemerintah di atasnya.
4. Pendapatan, adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah ekuitas dan lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
5. Efektif, merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan secara sederhana, efektif merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.
6. Efisien, adalah pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran/masukan (*output/input*) yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

D. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh penulis untuk mendukung penelitian ini adalah data sekunder, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan menganalisa data, informasi yang terdapat pada laporan atau dokumen yang tersedia, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan berupa

dokumen data laporan keuangan dibuat oleh pihak lain (Nuryaman dan Christina v., 2015). Berupa dokumen bukti catatan atau dokumen laporan keuangan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015-2017, pada kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dan keterangan yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menggunakan metode penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengadakan kunjungan secara langsung kepada objek penelitian yang telah ditetapkan.

Untuk mengumpulkan data lapangan maka digunakan tehnik atau metode sebagai berikut:

- a. Interview, yaitu Tanya jawab yang dilakukan dengan pemimpin perusahaan dan beberapa staf yang langsung menangani masalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b. *Observasi*, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan jalan membuat suatu konsep mengenai masalah yang berhubungan dengan judul penelitian penulis.
2. Untuk memperoleh data, digunakan teknik pengumpulan data berupa teknik dokumentasi yaitu melakukan penghimpunan data-data sekunder berupa data laporan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2015-2017.

F. Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Nuryaman (2015:06) menyatakan bahwa analisis deskriptif adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh gambaran atau deskriptif tentang karakteristik tertentu dari suatu objek yang sedang menjadi perhatian dalam objek penelitian dengan mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti berdasarkan angka-angka. Data laporan keuangan pemerintah daerah dalam bentuk laporan realisasi anggaran yang diperoleh, dianalisis dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah sebagai berikut:

1. Efektif dan Efisien Pendapatan dan Belanja Daerah

Rasio efektif pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang dianggarkan) pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Secara umum nilai efektif penerimaan PAD dapat dikategorikan sebagai berikut, dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan Pad}} \times 100\%$$

Sumber: (Abdul Halim, 2007:169)

TABEL: 3. 1**Niali Efektif PAD Secara Umum**

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

2. Analisis Efisien Belanja

Rasio efisien belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152). Efisien belanja dapat diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2007: 152)

Tabel: 3.2
Kriteria Tingkat Efisien Belanja Daerah Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kab. Enrekang

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintahan Kabupaten Enrekang yang merupakan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah. Cikal bakal keberadaan dari BPKD Kabupaten Enrekang yang sebelumnya menjadi Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang pada tahun 2004 adalah merupakan hasil penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Enrekang dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Enrekang.

Pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap nomenklatur organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). BPKD yang sudah ada ditambahkan tugas baru yaitu Badan Pengelolaan Asset Daerah yang sebelumnya adalah bagian perlengkapan pada sekretariat daerah sehingga

dibentuk organisasi perangkat daerah yang baru dan berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah atau yang disingkat dengan DPKAD sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah Kabupaten Enrekang Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Enrekang.

Kemudian pada Tahun 2016 Pemerintah kembali menerbitkan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dengan berlaku peraturan pemerintah tersebut maka dilakukan penataan dan peninjauan kembali terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Enrekang termasuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sehingga Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dipecah dan dimekarkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) dan bidang penerimaan DPKAD menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dan bidang Asset dikembalikan menjadi Bagian Aset pada sekretariat daerah sebagaimana ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten Enrekang Nomor 11 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.

2. Struktur Organisasi BPKD Kab. Enrekang

Berdasarkan peraturan Bupati Enrekang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian dan Tata Kerja BPKD Kabupaten Enrekang, maka Struktur Organisasi BPKD Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKD



Sumber: (Data Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Enrekang)

1. Kepala BPKD
2. Sekretariat :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program;
3. Bidang Anggaran, Membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Otorisasi Anggaran;
4. Bidang perbendaharaan, Membawahkan:
 - a. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung, Pembiayaan dan Pengelolaan Kas Daerah.

5. Bidang Verifikasi, Membawahkan:
 - a. Sub Bidang verifikasi Penatausahaan Keuangan;
 - b. Sub bidang verifikasi pertanggungjawaban;
6. Bidang Akuntansi Membawahkan:
 - a. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Neraca;

3. Visi dan Misi BPKD Kab. Enrekang

1. Visi:

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Efisien, Ekonomis, Transparansi dan Akuntabilitas untuk gerakan membangun Enrekang maju dan sejahtera.

2. Misi:

- a. Meningkatkan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku.
- b. Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur agar penatausahaan Pengelolaan Keuangan Daerah dapat berjalan secara Efektif, Efisien dan Akuntabilitas.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas BPKD Kab. Enrekang

Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) adalah melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.

1. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a. Badan pengelolaan keuangan daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah yang mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi.
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi;
 - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - 2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah;
 - 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan;
 - 4) Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
 - 5) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah; dan
 - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan petunjuk kepada sekretaris dan kepala bidang baik secara tertulis maupun lisan agar tugas-tugas dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Mengkoordinir kegiatan sekretaris dan kepala bidang lingkup badan pengelolaan keuangan daerah sesuai petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- 3) Menandatangani naskah dinas dalam bentuk nota dinas, konsep naskah dinas, surat tugas, surat perintah, perjalanan dinas, surat undangan, nota dinas, lebar disposisi dan daftar hadir serta surat-surat lainnya.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris Daerah serta unsur terkait.
- 5) Melaksanakan konsultasi baik secara horizontal maupun dengan instansi yang lebih tinggi.
- 6) Menetapkan Rencana Strategis Badan berdasarkan RPJM, Visi dan Misi serta program Bupati dibidang pengolahan keuangan daerah.
- 7) Menetapkan usulan program, rencana kerja dan anggaran tahunan berbasis kinerja dan berdasarkan Rencana Strategis serta masukan dari sekretariat dan Bidang-Bidang lingkup Badan.
- 8) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
- 9) Mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- 10) Melaksanakan fungsi Kepala Satuan Kerja Pengolahan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengolahan Keuangan Daerah (PPKD).
- 11) Melaksanakan fungsi Kepala Satuan Kerja Pengolahan Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pejabat pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- 12) Melaksanakan fungsi Pengguna Anggaran dan Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
- 13) Menetapkan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.
- 14) Menyiapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD.
- 15) Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD.
- 16) Melakukan evaluasi perkembangan penyelenggaraan program dan kegiatan pengelolaan keuangan daerah.
- 17) Melaporkan segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.
- 18) Menilai dan mengevaluasi kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan pengelola Keuangan Daerah.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan di bawah dan pertanggungjawaban kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyiapkan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi melaksanakan sub bagian umum dan

kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

b. Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan, pelaporan dan urusan rumah tangga;
- 2) Menyelenggarakan kebijakan administrasi umum;
- 3) Pembinaan, pengkoordinasikan, pengendalian dan pengawasan program kegiatan sub bagian;
- 4) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian.

c. Sekretaris Mempunyai Uraian Tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Sekretariat;
- 2) Penyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat;
- 3) Mengkoordinasikan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat dengan Kepala Badan serta para Kepala Bidang Lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 4) Membina dan mengkoordinasikan unit-unit kerja di Lingkup sekretariat;
- 5) Mendistribusikan Tugas Kepada Sub Bagian Lingkup Sekretariat;
- 6) Membantu Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup Sekretariat;

- 7) Mengkompilasi Kepala Badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai di lingkup sekretariat;
- 8) Membantu Kepala Badan mengkomplikasi, mengakselerasi dan merumuskan Penetapan Kinerja dari Bidang-bidang Penetapan Kinerja Badan;
- 9) Menghimpun dan mengelola Administrasi Data dan Informasi badan;
- 10) Menyelenggarakan pembinaan kegiatan kehumasan di lingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah;
- 11) Menetapkan pengalokasian perlengkapan badan;
- 12) Menata tata naskah dan ketatalaksanaan Badan;
- 13) Menyiapkan badan koordinasi dalam melaksanakan tugas Badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsioanal kepada unsur di lingkungan Badan serta menyiapkan rencana anggaran biaya operasional Badan;
- 14) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- 15) Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap tugas setiap Sub Bagian Lingkup Sekretariat;
- 16) Mengumpulkan bahan koordinasi dalam penyusunan dana pengendalian program kerja Badan;
- 17) Menghimpun, mengelola, menggandakan dan menyimpan dokumen perencanaan dan laporan Badan secara rapi;

- 18) Menyiapkan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional dan penatausahaan kepegawaian Badan;
- 19) Menyelenggarakan urusan umum, perencanaan, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, surat menyurat dan rumah tangga Badan;
- 20) Menyiapkan urusan anggaran Badan setiap tahunnya kepada instansi terkait;
- 21) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepala Badan;
- 22) Membuat telaahan staf dan pertimbangan kepada atasan;
- 23) Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sekretariat;
- 24) Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Bidang secara berkala;
- 25) Membantu Kepala Badan dalam menyusun laporan secara berkala dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan;
- 26) Menyelenggarakan perumusan Laporan Sekretariat secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan Bagian;
- 27) Melakukan penilaian hasil prestasi kerja dalam SKP;
- 28) Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dengan fungsinya.

3. Sub Bagian Perencanaan

- a. Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan

mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengendalian data, pembinaan evaluasi program/kegiatan badan pengelolaan keuangan daerah.

- b. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi:
 - 1) Melaksanakan kebijakan teknis sub bagian;
 - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian.
- c. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan rancangan rencana strategis Sub Bagian Perencanaan;
 - 2) Menyiapkan rancangan rencana anggaran satuan kerja Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Mengkoordinasikan rancangan rencana strategis dan rancangan rencana anggaran satuan kerja sub bagian serta dokumen penetapan kinerja bagian dengan sekretaris dinas, kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 4) Membina dan mengkoordinir tugas-tugas kerja dilingkup sub bagiannya;
 - 5) Membantu sekretaris badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup sub bagiannya;

- 6) Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sub bagian;
- 7) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan perumusan Visi, Misi Renstra dan Renja Badan;
- 8) Mengkoordinasikan, menghimpun dan memverifikasikan renstra dan renja dari masing-masing bidang;
- 9) Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah yang berhubungan dengan tugas-tugas perencanaan badan;
- 10) Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi instansi vertikal dan perangkat daerah lainnya dengan badan;
- 11) Menghimpun, mengklarifikasi dan menyusun data statistik perencanaan badan pengelola keuangan daerah;
- 12) Membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan penerapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) badan pengelolaan keuangan daerah;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sub bagian secara berkala;
- 14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugasnya; dan

15) Membantu sekretaris badan dalam menyusun laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan.

4. Sub Bagian Keuangan

- a. Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, mempunyai tugas melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan serta merumuskan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) badan.
- b. Kepala Sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - 4) Pelaksanaan evaluasi program dalam kegiatan dalam lingkup sub bagian.
- c. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian keuangan;
 - 2) Menyiapkan dan merumuskan rencana kerja anggaran sub bagian keuangan;
 - 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencana anggaran sub bagian keuangan dengan sekretaris badan, kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja di lingkup sub bagian;

- 5) Membantu sekretaris dalam pengelolaan urusan-urusan keuangan badan;
- 6) Membantu sekretaris dalam pembinaan dan pengembangan pegawai dilingkup sub bagian pengembangan pegawai dilingkup sub bagian keuangan;
- 7) Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat dan dokumen keuangan bagian badan;
- 8) Melaksanakan rencana strategis dan rencana anggaran sub bagian keuangan;
- 9) Menghimpun dan memverifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban keuangan badan;
- 10) Melaksanakan telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 11) Membantu sekretaris dalam rangka menghimpun dan merumuskan penetapan kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), badan pengelola keuangan daerah;
- 12) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 13) Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategis dan rencana anggaran satuan kerja sub bagian secara berkala; dan
- 14) Membantu laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sub bagian,

5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris dan mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyelenggarakan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian;
 - 2) Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian;
 - 3) Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap program dan kegiatan dalam lingkup sub bagian; dan
 - 4) Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkup sub.
- c. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Menyiapkan dan merumuskan rancangan rencana strategis sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) Menyiapkan dan merumuskan rencan kerja anggaran sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3) Mengkoordinasikan rencana strategis dan rencan kerja anggaran sub bagian dengan sekretaris dan kepala sub bagian perencanaan dan kepala sub bagian keuangan;
 - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas kerja lingkungan sub bagaian;

- 5) Menyiapkan bahan koordiansi dalam melaksanakan tugas badan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada unsur badan lingkup badan;
- 6) Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris badan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan pengelola keuangan daerah;
- 7) Mengadakan pembinaan dan pengendalian terhadap sub bagaian;
- 8) Menghimpun, mengelolan, menggandakan, dan menyimpan dokumen secara rapi;
- 9) Membantu kepala badan dalam mengelola urusan-urusan administrasi barang inventarisasi dan kepegawaian badan;
- 10) Menghimpun dan mengkomplikasi dokumen kepegawaian surat menyurat dan inventaris barang dari bidang dan unit pelaksanaan teknis bidang;
- 11) Menghimpun, memverifikasi dan memelihara dokumen dan informasi kepegawaian, surat menyurat dan barang inventaris serta perpustakaan badan;
- 12) Mengelola administrasi kepegawaian dan barang inventaris serta perpustakaan badan;
- 13) Membantu kepala badan dalam pembinaan dan pengembangan pegawaian di lingkup sub bagian umum dan kepegawaian;
- 14) Menerima dan memproses serta mendistribusikan surat, dokumen barang inventaris dan kepegawaian;

- 15) Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan rumah tangga dan inventaris barang;
- 16) Melaksanakan pengurusan administrasi perjalanan dinas;
- 17) Membuat telaahan staf kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- 19) Mengevaluasi pelaksanaan rencana strategs dan rencana anggaran satuan kerja sub secara berkala; dan
- 20) Membuat laporan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan sub bagian.

6. Bidang Anggaran

- a. Bidang anggaran dipimpin oleh seseorang kepala bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagaimana tugas BPKD lingkup penyusunan anggaran dan petunjuk teknis dalam penyelenggraan penyusunan APBD, perubahan APBD, nota pengantar APBD, nota pengantar perubahan APBD dan Otorisasi anggaran.
- b. Kepala bidang anggaran mempunyai fungsi :
 - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dibidang anggaran;

- 3) Pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
 - 4) Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang anggaran;
 - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan;
- c. Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang anggaran;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi anggaran, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dan pembiayaan;
 - 3) Pengkoordinasian penyusunan Kebijakan Ulang APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 - 4) Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan SKPKD;
 - 5) Pengkoordinasian dan penyusunan rancangan APBD dan perubahan APBD atas usulan SKPD;
 - 6) Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan asistensi rancangan APBD dan perubahan APBD, dan ranpergub penjabaran APBD dan perubahan APBD;
 - 7) Penyiapan bahan anggaran kas pemerintah daerah;
 - 8) Menyiapkan SPD sesuai DPA/DPPA SKPD;
 - 9) Penyusunan laporan realisasi SPD SKPD;
 - 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran;

- 11) Menyiapkan bahan pembiasaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Sub Bidang Penyusunan APBD

- a. Sub bidang penyusunan APBD dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas bidang perencanaan, pendaftaran dan pendataan dalam urusan perencanaan pendapatan daerah, pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi daerah;
- b. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
 - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan penyusunan APBD;
 - 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala sub bidang penyusunan APBD mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang penyusunan APBD;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan RKA SKPD dan RKA SKPKD;

- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan RAPBD dan perubahan APBD;
- 4) Pengkoordinasian RKA SKPD dan RKA SKPKD;
- 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan perda APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran APBD dan perubahan APBD;
- 6) Pengumpulan dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan rancangan perda APBD dan perubahan APBD dan rancangan perbup penjabaran APBD dan perubahan APBD;
- 7) Penyiapan bahan dan koordinasi evaluasi dan asistensi rancangan perda APBD dan perubahan APBD;
- 8) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup penyusunan APBD;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Sub Bidang Otorisasi Anggaran

- a. Sub bidang otorisasi anggaran dipimpin oleh seorang kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang anggaran. Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran.

- b. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai fungsi:
- 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
 - 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan otorisasi anggaran;
 - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala sub bidang otorisasi anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang otorisasi anggaran;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan DPA dan DPPA SKPD dan SKPKD;
 - 4) Pengkoordinasian DPA dan DPPA SKPKD;
 - 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rancangan anggaran kas pemerintah daerah;
 - 6) Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan DPA, DPPA dan anggaran kas pemerintah daerah;
 - 7) Penyiapan bahan dan koordinasi penerbitan SPD sesuai DPA dan DPPA SKPD;
 - 8) Penyiapan laporan realisasi SPD SKPD;

- 9) Penyusunan laporan kinerja program bidang anggaran lingkup otorisasi anggaran;
- 10) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas;
dan
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pembendaharaan

- a. Bidang pembendaharaan dipimpin oleh seseorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup pembebanan belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
- b. Kepala bidang pembendaharaan mempunyai fungsi;
 - 1) Perumusan kebijakan program kegiatan bidang pembendahaaran;
 - 2) Perumusan kebijakan pengelolaan bidang pembendaharaan;
 - 3) Melaksanakan kebijakan bidang pembendaharaan;
 - 4) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pembendaharaan;
 - 5) Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi mengenai bidang pembendaharaan;
 - 6) Melaksanakan fungsi kuasa bendahara umum daerah;
- c. Kepala bidang pembendaharaan, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang pembendaharaan;
- 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang pembendaharaan;
- 3) Melaksanakan fungsi kegiatan sebagai kuasa bendahara umum daerah;
- 4) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas dibidang belanj tidak langsung, belanja langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
- 5) Penyiapan SP2D belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan;
- 6) Pengujian terhadap pengajuan pembayaran belanja langsung, belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas daerah;
- 7) Penyiapan surat pemerintah pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
- 8) Penyusunan laporan pengelolaan kas daerah secara periodik;
- 9) Pencatatan data penerimaan dan belanja kedalam buku register serta membuat laporan harian tentang penerimaan dan belanja daerah;
- 10) Pelaksanaan rekonsiliasi dengan bank per periode;
- 11) Penyusunan laporan realisasi SP2D SKPD;
- 12) Penyusunan laporan kinerja program bidang perbendaharaan;
- 13) Penyiapan bahan dalam rangka penyelesaian masalah tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;
- 14) Penyiapan bahan pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

- 15) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Sub Bidang Belanja Langsung:

- a. Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh seseorang kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang perbendaharaan lingkup belanja langsung:
- b. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
 - 2) Peraturan penyelenggaraan urusan belanja langsung;
 - 3) Pelaksanaan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan belanja langsung;
 - 4) Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala sub bidang belanja langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Penyiapan rencana program dan kegiatan sub bidang belanja langsung;
 - 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja langsung;
 - 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja langsung;
 - 4) Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung SKPD;

- 5) Penyiapan register penolakan surat perintah membayar (SPM) belanja langsung;
- 6) Memproses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) belanja langsung;
- 7) Penyiapan bahan penyusunan

11. Sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelola kas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mempunyai rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas.
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;
- d. Melakukan pemeriksaan dan pengujian kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan pembiayaan dari SKPD;
- e. Penyiapan register penolakan surat perintah membayar belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- f. Memproses penerbitan surat perintah dana belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- g. Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD;
- h. Penyiapan bahan untuk penerbitan surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji;

- i. Penyusunan laporan realisasi SP2D belanja tidak langsung dan pembiayaan;
- j. Memproses pembayaran kepada bendahara pengeluaran atau pihak ketiga berdasarkan SP2D di Bank Sulselbar;
- k. Mengkoordinasi kegiatan di administrasi yang berhubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- l. Membukukan atau mencatat bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- m. Menyusun laporan kinerja program bidang perbendaharaan lingkup belanja tidak langsung, pembiayaan dan pengelolaan kas;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Bidang Verifikasi

- a. Bidang Verifikasi dipimpin oleh seseorang kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok melaksanakan sebagian tugas lingkup BPKD di bidang verifikasi.
- b. Kepala Bidang verifikasi mempunyai fungsi:
 - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan bidang verifikasi;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Bidang Verifikasi;

- 4) Pengawasan penyelenggaraan urusan Bidang verifikasi;
 - 5) Menyusun rancangan Sistem dan Prosedur penatausahaan Keuangan Daerah;
 - 6) Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
 - 7) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
 - 8) Melaksanakan pembinaan kepada PPK dan Bendahara Pengeluaran SKPD;
 - 9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala bidang Verifikasi mempunyai ruaiian tugas sebagai berikut:
- 1) Penyusunan rencana, anggaran, dan kegiatan bidang verifikasi;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang verifikasi;
 - 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi;
 - 4) Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;
 - 5) Pengujian terhadap surat perintah membayar (SPM) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pembiayaan yang diajukan oleh SKPD;
 - 6) Memverifikasi dan memeriksa kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan;

- 7) Menyusun rancangan sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
- 8) Melaksanakan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD;
- 9) Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan daerah;
- 10) Pelaksanaan pembinaan terhadap pejabat penatausahaan keuangan (PPK) dan bendahara pengeluaran SKPD;
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Fungsi Sub Bidang Verifikasi Penatausahaan Keuangan

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- b. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- c. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di sub bidang verifikasi penatausahaan keuangan;
- d. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat perintah membayar dari SKPD;
- e. Melakukan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan surat permintaan membayar dari SKPD;
- f. Melakukan verifikasi berita acara pembayaran pihak ketiga oleh SKPD

- g. Melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan SKPD;
- h. Melaksanakan pembinaan kepada PPK dan bendahara pengeluaran SKPD
- i. Penyusunan laporan kinerja program bidang verifikasi lingkup penatausahaan keuangan;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

14. Bidang Akuntansi

- a. Bidang akuntansi dipimpin oleh seorang kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKD lingkup akuntansi dalam rangka pertanggungjawaban APBD.
- b. Kepala bidang akuntansi mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Perumusan rencana kebijakan penyelenggaraan urusan akuntansi;
 - 2) Pengaturan penyelenggaraan urusan akuntansi;
 - 3) Pelaksanaan penyelenggaraan urusan akuntansi;
 - 4) Pengurusan penyelenggaraan urusan akuntansi;
 - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan.
- c. Kepala Bidang Akuntansi, mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan rencana, program, dan kegiatan bidang akuntansi;
 - 2) Penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang akuntansi;

- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi;
- 4) Pelaksanaan penyusunan, sosialisai dan asistensi sistem penatausahaan akuntansi pemerintah daerah;
- 5) Pengkoordinasian laporan keuangan, laporan kinerja dan laporan manajerial dari SKPD menjadi laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- 6) Penyajian data dan informasi di bidang analisa, bidang pelaporan keuangan serta bidang penatausahaan keuangan;
- 7) Penatausahaan pembukuan keuangan pemerintah daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah;
- 8) Penyusunan laporan realisasi APBD setiap semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- 9) Penelitian kelengkapan surat pertanggungjawaban belanja dan pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;
- 10) Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan;
- 11) Pelaksanaan pembinaan, pemantauan pengawasan dan pengendalian di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

15. Fungsi kepala sub bidang pembukuan dan pelaporan:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pembukuan dan pelaporan;

- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis dan perumusan kebijakan lingkup akuntansi;
- c. Pelaksanaan verifikasi atas SP2D yang telah terbit;
- d. Menghimpun proyeksi pendapatan dari seluruh SKPD dalam rangka pengelolaan anggaran kas;
- e. Pelaksanaan pembukuan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. Pengesahan surat pertanggungjawaban pendapatan;
- g. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup akuntansi;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

16. Fungsi Sub Bidang Neraca sebagai berikut:

- a. Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang neraca;
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup neraca;
- c. Penghimpun dan pengelolaan data serta informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- d. Pelaksanaan konsolidasi dan rekonsiliasi pelaporan keuangan SKPD dengan keuangan SKPKD;
- e. Pelaporan penerimaan daerah secara terpadu pada semua unit pelaksanaan secara integritas;

- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan semester dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
- g. Penyusunan laporan keuangan tahunan;
- h. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah
- i. Penyiapan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- j. Penyusunan laporan kinerja program bidang akuntansi dan pelaporan lingkup pelaporan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Enrekang

APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) serta ditetapkan dengan peraturan daerah yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah, penyusunan rancangan APBD berpedoman pada peraturan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara.

Menurut Abdul Halim (2007:99) Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dan pada periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemda.

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Berikut tabel Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2015-2017

Tabel 4.1

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah T.A 2015-2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Pendapatan Pajak Daerah	7.340.370.536,00	9.147.403.707,00	9.023.051.580,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	15.557.657.681,00	19.878.129.053,00	25.358.968.848,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.387.902.299,67	4.826.158.746,00	12.355.808.162,48
4	Lain-lain PAD yang sah	22.928.869.762,77	22.531.755.482,95	53.376.386.128,07
5	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	49.214.800.279,44	56.383.446.988,95	100.114.214.718,55

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Dari tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan asli daerah Kab. Enrekang dari tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan

yaitu sebesar Rp49.214.800.279,44; Rp56.383.446.988,95; dan Rp100.114.214.718,55.

2. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi ini disebut juga dana perimbangan. Berikut tabel pendapatan transfer Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2017

Tabel 4.2

Ringkasan Laporan Realisasi Pendapatan Transfer T.A 2015-2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Dana Bagi Hasil Pajak	15.662.422.850,00	16.948.689.099,00	13.136.161.539,00
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	2.505.549.234,00	7.846.379.393,00	3.797.817.438,00
3	Dana Alokasi Umum	526.156.286.000,00	543.890.364.000,00	534.335.959.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	172.525.530.000,00	264.434.758.356,00	213.747.024.586,00
5	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	716.849.788.084,00	833.120.190.848,00	765.016.962.563,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer Kabupaten Enrekang dari tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar Rp716.849.788.084,00 Dan Rp833.120.190.848,00, sedangkan ditahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp765.016.962.563,00.

3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah yang dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara-cara yang wajar dan tidak menyalahi peraturan yang berlaku.

Berikut tabel Pendapatan Yang sah Kabupaten Enrekang tahun 2015-2017

Tabel 4.3

Ringkasan Laporan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah T.A 2015-2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Pendapatan Hibah	5.659.513.450,00	1.282.142.542,00	6.527.246.258,00
2	Pendapatan Dana Darurat	-	0,00	0,00
3	Pendapatan Lainnya	394.778.079,00	1.185.000,00	0,00
4	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	6.054.291.529,00	1.283.327.542,00	6.527.246.258,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah dari tahun 2015 sampai pada tahun 2016 mengalami penurunan yaitu masing-masing sebesar Rp6.054.291.529,00 dan Rp1.283.327.542,00. Sedangkan ditahun 2017 kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp6.527.246.258,00.

4. Realisasi Belanja Operasi

Belanja Operasi dan Belanja Modal merupakan pos-pos penyusun belanja daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut ini merupakan tabel Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal Kabupaten Enrekang Tahun 2015 sampai 2017.

Tabel 4.4**Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Operasi T.A 2015-2017**

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Belanja Pegawai	418.177.792.457,00	426.236.939.323,00	369.600.973.631,00
2	Belanja Barang dan Jasa	176.027.294.250,00	213.139.899.544,00	266.957.030.483,00
3	Belanja Bunga	-	0,00	0,00
4	Belanja Subsidi	-	0,00	0,00
5	Belanja Hibah	2.773.000.000,00	26.085.035.720,00	31.716.827.325,00
6	Bantuan Sosial	79.000.000,00	47.000.000,00	206.500.000,00
7	Bantuan Keuangan	-	-	-
8	Jumlah Belanja Operasi (39 s.d 45)	597.057.086.707,00	665.508.874.587,00	668.481.331.439,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukkan bahwa jumlah Realisasi Belanja Operasi dari Tahun 2015 sampai tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu masing-masing sebesar Rp597.057.086.707,00; Rp665.508.874.587,00 dan Rp668.481.331.439,00

5. Realisasi Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berikut ini tabel belanja modal Kabupaten Enrekang Tahun 2015 sampai tahun 2017

Tabel 4.5

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Modal T.A 2015-2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Belanja Tanah	122.119.500,00	641.500.000,00	548.080.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	26.322.087.470,00	36.801.643.846,00	28.871.268.774,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	83.751.401.877,00	48.386.453.802,00	44.110.599.986,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	147.720.077.088,00	243.778.683.369,00	126.522.778.285,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.480.000,00	297.036.500,00	35.750.000,00
6	Belanja Aset Lainnya	-	0,00	0,00
7	Jumlah Belanja Modal (49 s.d 54)	257.924.165.935,00	329.905.317.517,00	200.088.477.045,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal tahun 2015 sampai 2016 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp257.924.165.935,00 dan Rp329.905.317.517,00, sedangkan di tahun 2017 mengalami penurunan yaitu sebesar Rp200.088.477.045,00.

6. Relaisasi Belanja Tak Terduga

Relaisasi Belanja Tak Terduga adalah kegiatan belanja daerah yang dianggarkan dan tidak memiliki hubungan apapun secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Berikut tabel Belanja Tak Terduga Kabupaten Enrekang Tahun 2015-2017

Tabel 4.6

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tak Terduga T.A 2015-2017

No	Uraian	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017
1	Belanja Tak Terduga	-	227.700.000,00	70.050.000,00
2	Jumlah Belanja Tak Terduga (58)	-	227.700.000,00	70.050.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2015 tidak menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga, sedangkan tahun 2016 yaitu sebesar Rp227.700.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp70.050.000,00.

C. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Hansen, Women (2005:116) mendefinisikan laporan realisasi sebagai berikut “laporan pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawabannya”.

Hansen, Women (2012:229) dalam laporan pertanggungjawaban memiliki empat (4) elemen penting yaitu pembebanan tanggungjawab, pembuatan ukuran kinerja atau *benchmarking*, pengevaluasian kinerja dan pemberian penghargaan.

Dari devinisi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa laporan pertanggungjawaban adalah suatu sistem akuntansi yang membagi struktur

organisasi atas bagian-bagian atau pusat pertanggungjawaban yang memiliki otoritas dan tanggungjawab yang jelas. Dari setiap pusat pertanggungjawaban tersebut dikumpulkan dan dilaporkan penyimpangan yang terjadi apakah terjadi devisa atau surplus anggaran terhadap realisasi anggaran.

Berikut adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Tahun 2015-2017

Tabel 4.7

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
PENDAPATAN	946.648.050.605,00	919.862.386.647,46
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.857.486.754,00	49.214.800.279,44
PENDAPATAN TRANSFER	885.039.847.851,00	864.593.294.839,02
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.750.716.000,00	6.054.291.529,00
BELANJA	1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00
BELANJA OPERASI	662.849.722.628,00	597.057.086.707,00
BELANJA MODAL	323.990.191.974,00	257.924.165.935,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	0,00
TRANSFER	48.294.815.800,00	48.128.912.255,00
PEMBIAYAAN	89.236.679.797,00	62.384.059.850,08
PENERIMAAN DAERAH	100.038.475.771,00	72.384.059.850,08
PENGELUARAN DAERAH	10.801.795.974,00	10.000.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp919.862.386.647,46 lebih rendah dari pada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang

sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 49.214.800.279,44, pendapatan transfer sebesar Rp 864.593.294.839,02 dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 6.054.291.529,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 903.110.164.897,00 lebih rendah daripada target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 597.057.086.707,00, belanja modal sebesar Rp 257.924.165.935,00, belanja tak terduga sebesar Rp 0,00 dan transfer sebesar Rp 48.128.912.255,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp 62.384.059.850,08 lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp 72.384.059.850,08 dan 10.000.000.000,00.

Tabel 4.8
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
PENDAPATAN	1.103.986.718.250,00	1.032.816.629.667,45
PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.863.375.385,00	56.383.446.988,95
PENDAPATAN TRANSFER	1.037.274.320.323,00	975.149.855.136,50
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.849.022.542,00	1.283.327.542,00
BELANJA	1.206.155.278.726,00	1.091.335.511.816,00
BELANJA OPERASI	707.040.121.137,00	665.508.874.587,00

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
BELANJA MODAL	402.667.852.324,00	329.905.317.517,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.110.457.973.461,00	995.641.892.104,00
TRANSFER	95.697.305.265,00	95.693.619.712,00
PEMBIAYAAN	102.168.560.476,00	64.741.440.129,54
PENERIMAAN DAERAH	114.316.060.862,00	76.023.582.671,54
PENGELUARAN DAERAH	12.147.500.386,00	11.282.142.542,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan tahun anggaran 2016, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp 1.032.816.629.667,45, lebih rendah daripada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp 56.383.446.988,95, pendapatan transfer sebesar Rp 975.149.855.136,50, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 1.283.327.542,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp 1.091.335.511.816,00 lebih rendah daripada target anggaran. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.091.335.511.816,00 lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp.665.508.874.587,00, belanja modal sebesar Rp. 329.905.317.517,00, belanja tak terduga sebesar Rp. 995.641.892.104,00 dan transfer sebesar Rp. 95.693.619.712,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp. 64.741.440.129,54 lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 76.023.582.671,54 dan Rp. 11.282.142.542,00.

Tabel 4.9

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3
PENDAPATAN	1.057.719.428.195,00	1.000.853.540.078,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.421.960.638,00	53.376.386.128,07
PENDAPATAN TRANSFER	915.230.706.613,00	894.212.079.102,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.336.630.000,00	6.527.246.258,00
BELANJA	1.094.641.986.176,00	988.755.388.102,00
BELANJA OPERASI	707.508.330.458,00	668.481.331.439,00
BELANJA MODAL	239.221.872.318,00	200.088.477.045,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	250.000.000,00	70.050.000,00
TRANSFER	147.661.783.400,00	120.115.529.618,00
PEMBIAYAAN	36.922.557.981,00	(5.763.967.023,01)
PENERIMAAN DAERAH	49.322.557.981,00	6.236.032.976,99
PENGELUARAN DAERAH	12.400.000.000,00	12.000.000.000,00

Sumber: Badan Pengelolaan keuangan Daerah Kab. Enrekang

Dari tabel diatas, dapat dilihat realisasi pendapatan, realisasi belanja dan realisasi pembiayaan tahun anggaran 2017. Jumlah realisasi pendapatan sebesar Rp. 1.000.853.540.078,55, lebih rendah daripada target anggaran yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. Jumlah pendapatan asli daerah sebesar Rp. 53.376.386.128,07, pendapatan

transfer sebesar Rp. 894.212.079.102,00, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.6.527.246.258,00.

Jumlah realisasi belanja sebesar Rp. 988.755.388.102,00 lebih rendah daripada target anggaran, anggaran belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan transfer. Jumlah realisasi belanja operasi sebesar Rp. 668.481.331.439,00, belanja modal sebesar Rp. 200.088.477.045,00, belanja tak terduga sebesar Rp. 70.050.000,00 dan transfer sebesar Rp. 120.115.529.618,00.

Jumlah realisasi pembiayaan sebesar Rp. (5.763.967.023,01) lebih rendah daripada target yang dianggarkan. Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Jumlah realisasi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 6.236.032.976,99 dan Rp.12.000.000.000,00.

D. Perhitungan dan Analisis Rasio Efektif Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Efektif Pendapatan daerah

Efektif menunjukkan sampai dimana tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan pengertian efektif menurut Hidayat, "Efektif adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target kualitas, kuantitas dan waktu yang telah tercapai dimana semakin besar persentase target maka semakin tinggi efektifnya".

TABEL: 4. 10

Kriteria Tingkat Efektif Penerimaan PAD

Kategori	Predikat
Sangat efektif	>100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80% - 90%
Kurang efektif	60% - 80%
Tidak efektif	< 60%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

2. Efisien Belanja Daerah

Rasio efisien belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisien anggaran jika rasio efisiennya kurang dari 100%. Sebaliknya jika melebihi 100% maka mengindikasikan terjadinya pemborosan anggaran (Mahmudi, 2007: 152).

Efisien belanja dapat diukur dengan Rumus:

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Sumber: (Mahmudi, 2007: 152)

Tabel: 4.11
Kriteria Tingkat Efisien Belanja Secara Umum

Kategori	Predikat
Sangat efisien	<60%
Efisien	60%-80%
Cukup efisien	80%-90%
Kurang efisien	90%-100%
Tidak efisien	>100%

Sumber: (Mohamad Mahsun:2006. Depdagri Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996)

Rasio efektif pendapatan asli daerah ini dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (yang dianggarkan) pendapatan daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan target. Berikut ini tabel perhitungan Efektif Pendapatan Daerah Kab. Enrekang:

Tabel 4.12
Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang
Tahun 2015

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	946.648.050.605,00	919.862.386.647,46	26.785.663.957,54	97,17
PENDAPATAN ASLI DAERAH	55.857.486.754,00	49.214.800.279,44	6.642.686.474,56	88,11
PENDAPATAN TRANSFER	885.039.847.851,00	864.593.294.839,02	20.446.553.011,98	97,69
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.750.716.000,00	6.054.291.529,00	-303.575.529,00	105,28
BELANJA	1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00	132.774.565.505,00	87,18
BELANJA OPERASI	662.849.722.628,00	597.057.086.707,00	65.792.635.921,00	90,07
BELANJA MODAL	323.990.191.974,00	257.924.165.935,00	66.066.026.039,00	79,61
BELANJA TIDAK TERDUGA	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
TRANSFER	48.294.815.800,00	48.128.912.255,00	165.903.545,00	99,66
PEMBIAYAAN	89.236.679.797,00	62.384.059.850,08	26.852.619.946,92	69,91
PENERIMAAN DAERAH	100.038.475.771,00	72.384.059.850,08	27.654.415.920,92	72,36
PENGELUARAN DAERAH	10.801.795.974,00	10.000.000.000,00	801.795.974,00	92,58
Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan				73,92

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{919.862.386.647,46}{946.648.050.605,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 97,17\%$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif sebesar 97,17%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Efisien Belanja} = \frac{903.110.164.897,00}{1.035.884.730.402,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisien Belanja} = 87,18\%$$

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{597.057.086.707,00}{662.849.722.628,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja operasi} = 90,07\%$$

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{257.924.165.935,00}{323.990.191.974,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 79,61\%$$

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{0,00}{750.000.000,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tak Terduga} = 0,00\%$$

$$5) \text{ Transfer} = \frac{48.128.912.255,00}{48.294.815.800,00} \times 100\%$$

$$\text{Transfer} = 99,66\%$$

$$6) \text{ Pembiayaan} = \frac{62.384.059.850,08}{89.236.679.797,00} \times 100\%$$

$$\text{Pembiayaan} = 69,91\%$$

$$7) \text{ Penerimaan Daerah} = \frac{72.384.059.850,08}{100.038.475.771,00} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = 72,36\%$$

$$8) \text{ Pengeluaran Daerah} = \frac{10.000.000.000,00}{10.801.795.974,00} \times 100\%$$

$$\text{Pengeluaran Daerah} = 92,58\%$$

Berdasarkan perhitungan rasio efisien diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 87,18%; 90,07%; 79,61%; 0,00%;

99,66%; 69,91%; 72,36%; dan 92,58%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 73,92%, sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 73,92\% = 26,08\%$. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2015

Tabel 4.13

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Tahun 2016

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.103.986.718.250,00	1.032.816.629.667,45	71.170.088.582,55	93,55
PENDAPATAN ASLI DAERAH	63.863.375.385,00	56.383.446.988,95	7.479.928.396,05	88,29
PENDAPATAN TRANSFER	1.037.274.320.323,00	975.149.855.136,50	62.124.465.186,50	94,01
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	2.849.022.542,00	1.283.327.542,00	1.565.695.000,00	45,04
BELANJA	1.206.155.278.726,00	1.091.335.511.816,00	114.819.766.910,00	90,48
BELANJA OPERASI	707.040.121.137,00	665.508.874.587,00	41.531.246.550,00	94,13
BELANJA MODAL	402.667.852.324,00	329.905.317.517,00	72.762.534.807,00	81,93
BELANJA TIDAK TERDUGA	1.110.457.973.461,00	995.641.892.104,00	114.816.081.357,00	89,66
TRANSFER	95.697.305.265,00	95.693.619.712,00	3.685.553,00	100,00
PEMBIAYAAN	102.168.560.476,00	64.741.440.129,54	37.427.120.346,46	63,37
PENERIMAAN DAERAH	114.316.060.862,00	76.023.582.671,54	38.292.478.190,46	66,50
PENGELUARAN DAERAH	12.147.500.386,00	11.282.142.542,00	865.357.844,00	92,88
Rata-rata belanja dan Pembiayaan				84,87

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{1.032.816.629.667,45}{1.103.986.718.250,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 93,55\%$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif sebesar 93,55%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Efisien Belanja} = \frac{1.091.335.511.816,00}{1.206.155.278.726,00} \times 100\%$$

$$\text{Efisien Belanja} = 90,48\%$$

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{665.508.874.587,00}{707.040.121.137,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja operasi} = 94,13\%$$

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{329.905.317.517,00}{402.667.852.324,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Modal} = 81,93\%$$

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{995.641.892.104,00}{1.110.457.973.461,00} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tak Terduga} = 89,66\%$$

$$5) \text{ Transfer} = \frac{95.693.619.712,00}{95.697.305.265,00} \times 100\%$$

$$\text{Transfer} = 100,00\%$$

$$6) \text{ Pembiayaan} = \frac{64.741.440.129,54}{102.168.560.476,00} \times 100\%$$

$$\text{Pembiayaan} = 63,37\%$$

$$7) \text{ Penerimaan Daerah} = \frac{76.023.582.671,54}{114.316.060.862,00} \times 100\%$$

$$\text{Penerimaan Daerah} = 66,50\%$$

$$8) \text{ Pengeluaran Daerah} = \frac{11.282.142.542,00}{12.147.500.386,00} \times 100\%$$

PengeluaranDaerah = 92,88%

Berdasarkan perhitungan rasio efisien atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 90,48%; 94,13%; 81,93%; 89,66%; 100,00%; 63,37%; 66,50% dan 92,88%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 84,87%, sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 84,87\% = 15,13\%$. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2016

Tabel 4.14

Ringkasan Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang Tahun 2017

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Selisih	
	ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN	1.057.719.428.195,00	1.000.853.540.078,55	56.865.888.116,45	94,62
PENDAPATAN ASLI DAERAH	83.421.960.638,00	53.376.386.128,07	30.045.574.509,93	63,98
PENDAPATAN TRANSFER	915.230.706.613,00	894.212.079.102,00	21.018.627.511,00	97,70
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	6.336.630.000,00	6.527.246.258,00	-190.616.258,00	103,01
BELANJA	1.094.641.986.176,00	988.755.388.102,00	105.886.598.074,00	90,33
BELANJA OPERASI	707.508.330.458,00	668.481.331.439,00	39.026.999.019,00	94,48
BELANJA MODAL	239.221.872.318,00	200.088.477.045,00	39.133.395.273,00	83,64
BELANJA TIDAK TERDUGA	250.000.000,00	70.050.000,00	179.950.000,00	28,02
TRANSFER	147.661.783.400,00	120.115.529.618,00	27.546.253.782,00	81,35
PEMBIAYAAN	36.922.557.981,00	-5.763.967.023,01	42.686.525.004,01	-15,61
PENERIMAAN DAERAH	49.322.557.981,00	6.236.032.976,99	43.086.525.004,01	12,64
PENGELUARAN DAERAH	12.400.000.000,00	12.000.000.000,00	400.000.000,00	96,77
Rata-Rata Belanja dan Pembiayaan				58,95

Sumber: Data Diolah Penulis (2018)

a. Efektif Pendapatan Daerah

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = \frac{1.000.853.540.078,55}{1.057.719.428.195,00} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efektif} = 94,62\%$$

Dari perhitungan rasio efektif pendapatan diatas terlihat bahwa realisasi anggaran lebih kecil daripada target anggaran sehingga tercapai tingkat efektif sebesar 94,62%.

b. Efisien Belanja Daerah

$$\text{Rasio Efisien Belanja} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

$$1) \text{ Efisien Belanja} = \frac{988.755.388.102,00}{1.094.641.986.176,00} \times 100\%$$

Efisien Belanja = 90,33%

$$2) \text{ Belanja Operasi} = \frac{668.481.331.439,00}{707.508.330.458,00} \times 100\%$$

Belanja operasi = 94,48%

$$3) \text{ Belanja Modal} = \frac{200.088.477.045,00}{239.221.872.318,00} \times 100\%$$

Belanja Modal = 83,64%

$$4) \text{ Belanja Tak Terduga} = \frac{70.050.000,00}{250.000.000,00} \times 100\%$$

Belanja Tak Terduga = 28,02%

$$5) \text{ Transfer} = \frac{120.115.529.618,00}{147.661.783.400,00} \times 100\%$$

Transfer = 81,35%

$$6) \text{ Pembiayaan} = \frac{-5.763.967.023,01}{36.922.557.981,00} \times 100\%$$

Pembiayaan = -15,61%

$$7) \text{ Penerimaan Daerah} = \frac{6.236.032.976,99}{49.322.557.981,00} \times 100\%$$

Penerimaan Daerah = 12,64%

$$8) \text{ Pengeluaran Daerah} = \frac{12.000.000.000,00}{12.400.000.000,00} \times 100\%$$

Pengeluaran Daerah = 96,77%

Berdasarkan perhitungan rasio efisien atas menunjukkan bahwa Kabupaten Enrekang telah mengefisienkan dalam penggunaan anggaran Belanja, Belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, transfer, pembiayaan, penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masing-masing memiliki rasio efisien sebesar 90,33%; 94,48%; 83,64%; 28,02%; 81,35%; -15,61%; 12,64%; dan 96,77%. Jadi rata-rata efisien realisasi belanja yaitu sebesar 58,95%, sehingga rasio efisien Belanjanya yaitu $100\% - 58,95\% = 41,05\%$. Sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah Kabupaten Enrekang

telah mampu melakukan realisasi belanja dengan sangat efisien pada tahun 2017

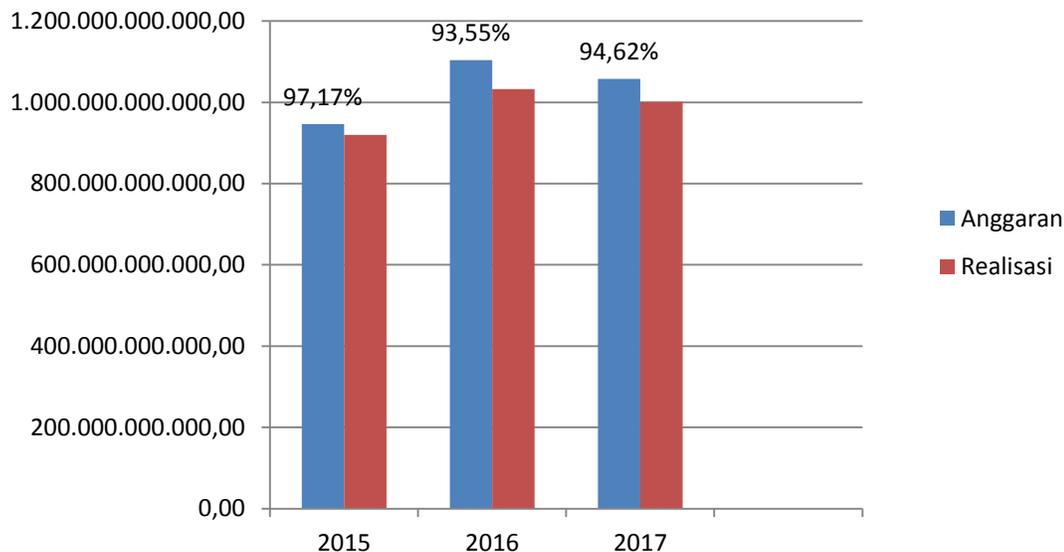
Tabel 4.15
Rasio Efektif Anggaran Pendapatan
Pemerintah Daerah Keb. Enrekang T.A 2015-2017

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)	Analisis Efektif
2015	946.648.050.605,00	919.862.386.647,46	97,17	Efektif
2016	1.103.986.718.250,00	1.032.816.629.667,45	93,55	Efektif
2017	1.057.719.428.195,00	1.000.853.540.078,55	94,62	Efektif

Sumber: Data diolah penulis (2018)

Dari tabel diatas diketahui bahwa rasio efektif pendapatan pemerintah daerah kab. Enrekang T.A 2015, 2016 dan 2017 belum mencapai target namun dalam kategori sudah efektif dalam merealisasikan anggaran pendapatan yaitu sebesar 97,17%, 93,55% dan 94,62%. Hal ini disebabkan realisasi anggaran pendapatan lebih kecil daripada target anggaran pendapatan.

**Grafik Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Daerah
Kab. Enrekang TA 2015-2017**



Berdasarkan grafik realisasi anggaran pendapatan diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2015-2017, realisasi anggaran pendapatan lebih kecil daripada jumlah yang dianggarkan dan terlihat pula bahwa pada tahun 2015-2016 anggaran pendapatan dan realisasinya mengalami kenaikan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2015 persentase anggaran pendapatan sebesar Rp. 946.648.050.605,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp. 919.862.386.647,46 dengan persentase sebesar 97,17%. Pada tahun 2016 Anggaran pendapatan yaitu sebesar Rp. 1.103.986.718.250,00 sedangkan realisasinya lebih kecil yaitu sebesar Rp. 1.032.816.629.667,45 dengan persentase sebesar 93,55%. Dan pada tahun 2017 anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.057.719.428.195,00 dan realisasinya lebih kecil yaitu sebesar Rp. 1.000.853.540.078,55 dengan persentase sebesar 94,62%.

Tabel 4.16

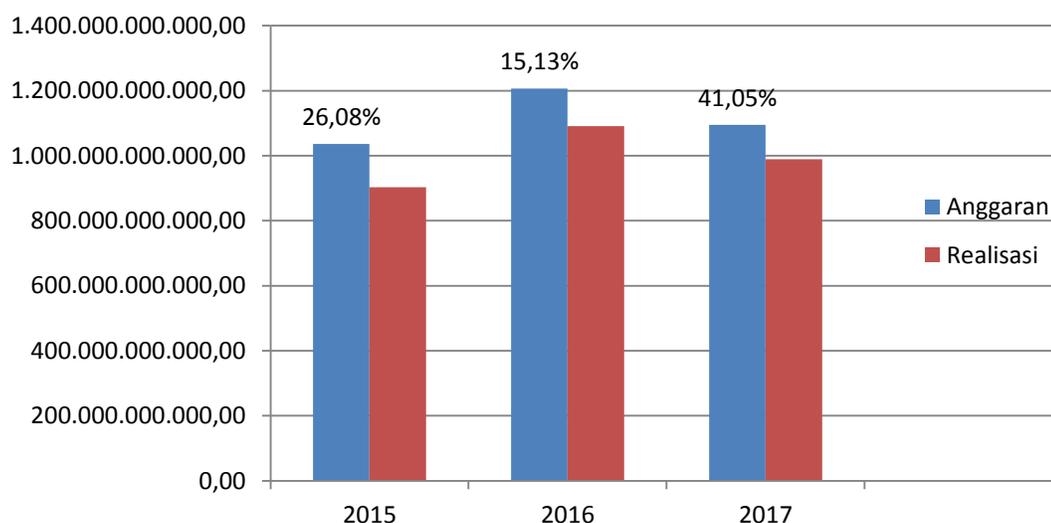
**Rasio Efisien Anggaran Belanja
Pemerintah Daerah Kab. Enrekang T.A 2015-2017**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Rata-Rata	Persentase (%)	Analisis Efisien
2015	1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00	73,92%	26,08%	Sangat efisien
2016	1.206.155.278.726,00	1.091.335.511.816,00	84,87%	15,13%	Sangat efisien
2017	1.094.641.986.176,00	988.755.388.102,00	58,95%	41,05%	Sangat efisien

Sumber: data diolah penulis (2018)

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa rasio efisien belanja pemerintah daerah pada pemerintah daerah kab. Enrekang T.A 2015-2017 dinilai sangat efisien dalam merealisasikan belanja karena dapat berhemat lebih besar dengan rasio sefisien yaitu sebesar 26,08%; 15,13%; dan 41,05%.

**Grafik Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab.
Enrekang TA 2015-2017**



Berdasarkan grafik Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kab. Enrekang TA 2015-2017 tedahulu, menunjukkan bahwa Realisasi Anggaran Belanja lebih kecil daripada anggaran belanja. Dan terlihat pula bahwa anggaran belanja dan realisasainya mengalami kenaikan pada tahun 2015-2016 yaitu pada tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 1.035.884.730.402,00 dengan realisasi sebesar Rp. 903.110.164.897,00 dengan persentase sebesar 26,08%, sedangkan pada tahun 2016 yaitu sebesar Rp. 1.206.155.278.726,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.091.335.511.816,00 dengan persentase sebesar 15,13%. Sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan dengan anggaran sebesar Rp. 1.094.641.986.176,00 dan realisasinya sebesar Rp. 988.755.388.102,00 dengan persentase sebesar 41,05%.

E. Analisis Rasio Efektif dan Efisien Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran berisi rencana kegiatan yang depersentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Jika anggaran pendapatan lebih kecil daripada realisasinya maka anggaran tersebut efektif sedangkan jika anggaran pendapatan lebih besar maka anggaran tersebut cukup efektif atau bahkan tidak efektif. Efektif anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan yaitu jika anggaran belanja lebih besar dari pada realisasinya maka anggaran tersebut

Efisien, sedangkan jika anggaran belanja lebih kecil daripada realisasinya maka anggaran tersebut tidak efisien.

1. Rasio Efektif

Berdasarkan hasil penelitian rasio efektif anggaran pendapatan pada pemerintah daerah kab. Enrekang pada tahun 2015-2017 dinilai sudah efektif dalam mengelola anggaran pendapatan yaitu sebesar 97,17%, 93,55% dan 94,62%. Tingkat efektif yang paling tinggi tercapai pada T.A 2015 yaitu dengan persentase sebesar 97,17%

2. Rasio Efisien

Hasil penelitian rasio efisien belanja pada pemerintah daerah Kab. Enrekang dinilai sangat efisien karena pemerintah daerah Kabupaten Enrekang telah mampu mengelola anggaran secara hemat untuk tahun anggaran 2015-2017 hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran belanja kabupaten Enrekang yang tidak terdapat angka melebihi anggaran belanja. Rasio efisien dalam penggunaan anggaran belanja T.A 2015, 2016 dan 2017 yaitu sebesar 26,08%; 15,13%; dan 41,05%.

Dengan demikian rasio keuangan daerah kab. Enrekang dikatakan efektif pada tahun anggaran 2015-2017 dengan total 97,17%, 93,55% dan 94,62% dan kinerja belanja pemerintah Kab. Enrekang dikatakan sangat efisien pada tahun 2015-2017 dengan total sebesar 26,08%; 15,13% dan 41,05%. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Marchelino Daling (2013) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja pendapatan sudah efektif hal ini terlihat bahwa jumlah realisasi

anggaran yang lebih kecil dibandingkan dengan target anggaran dengan total rata-rata sebesar 97,71%. Sedangkan kinerja belanja sudah efisien hal ini menunjukkan lebih kecilnya anggaran belanja yang terealisasi dari yang telah dianggarkan.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Inggriani Elim (2015) yang hasil perhitungan rasio efisien belanja pada T.A 2013-2014 pada pemerintah kota Kotamobagu dapat melakukan penghematan anggaran dengan sangat efisien sebesar 12,73%.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa jika anggaran pendapatan lebih tinggi daripada realisasi pendapatan maka menghasilkan selisih bertambah. Semakin besar tingkat realisasi pendapatan dibandingkan dengan target yang dianggarkan, maka semakin tinggi tingkat efektifnya, sedangkan anggaran belanja berbanding terbalik dengan anggaran pendapatan. Jika anggaran belanja lebih besar daripada realisasi maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah mampu mengefisienkan belanjanya, dari itu maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektif pendapatan dari pemerintah Kab. Enrekang T.A 2015-2017 belum mencapai target namun sudah mencapai kategori efektif karena berada pada predikat 90%-100%, hal ini terlihat dari lebih kecilnya jumlah realisasi anggaran pendapatan dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan pada tahun anggaran 2015-2017 yaitu sebesar 97,17%; 93,55%; dan 94,62%.
2. Tingkat efisien belanja dari pemerintah daerah Kab. Enrekang periode 2015-2017, Pemerintah kabupaten Enrekang dinilai mampu menghemat anggaran belanja dengan sangat efisien, hal ini terlihat dari tidak adanya angka yang melebihi anggaran belanja, yang mampu menghemat anggaran belanja sebesar 26,08%; 15,13%; 41,05%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian serta hal-hal yang terkait dengan keterbatasan penelitian, maka peneliti memberikan saran kepada pemerintah daerah Kab. Enrekang sebagai berikut:

1. Pemerintah Kab. Enrekang harus lebih berusaha lagi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendapatan pajak dengan memaksimalkan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), serta mengembangkan potensi-potensi baru yang ada di daerah Enrekang karena ini akan sangat bermanfaat untuk percepatan pembangunan serta menunjang sebagai daerah otonomi yang mampu mandiri dan tidak bergantung pada dana transfer.
2. Sedangkan pada tingkat efisien belanja Pemerintah Kab. Enrekang disarankan untuk tetap mempertahankan penggunaan anggaran belanja secara hemat sehingga bisa selalu tercapai target efisien belanja dan tidak bergantung pada belanja transfer dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Makka, Harry., David P.E.Saerang, Inggriani Elim. 2015. Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Asset Daerah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Imiah Efisiensi*. Vol.15 No.04.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:Penerbit Erlangga.
- Daling, Marcheno. 2013. Analisis Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*. Vol.1 No.3.
- Dien, A. N. J., Tinangon, J., & Stanley, W. (2015). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 3(1), 534–541.
- F.Palilingan, Anastasia., H. Sabijono, L. Mawikere. 2015. Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.1.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2011. *Akuntansi Sector Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Edisi 1. Jakarta.
- _____ (2007). *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*.Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- _____ 2008. *Akuntansi Sector Publik: Akuntansi keuangan Daerah Edisi 3*. Yogyakarta: Penerbit Salemba 4.
- Handoko,Abdurrahman Wiro. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Berbasis Kinerja Pada Dispenda Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.3 No.12.
- Hansen & women 2005. *Managemen accounting*. Edisi ketujuh. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2012. *Akuntansi Manajerial*. Edisi Kedelapan. Jakarta: Salemba Empat.
- Hesrini, Elly. 2015. Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bead An Cukai Gresik. *Jurnal ilmu manajemen MAGISTRA*. Vol.1 No.1.
- Ikatan Akuntansi Indonesia 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Margono. 2010. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Mahsun, Mohammad 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi pertama. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahmudi.2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nuryaman. Christina, V.2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori dan Praktek*. Bogor. Ghalia Indonesia
- Renyowijoyo Muindro. 2012. *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 3*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Rukayah, Nugrahini Kusunmawati, Raden Irna Afriani. 2017. Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dengan Menggunakan Rasio Efektivitas Dean Rasio Efisiensi Pada Kantor Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang. *Jurnal Akuntansi*. Vol.4 No.2
- Santie, E.J.G., J.J. Tinangon, L.M. Mawikere. 2015. Analisis Penyajian Realisasi Anggaran Pada Dinas Energy dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*. Vol.3 No.2
- Standar Akuntansi Pemerintah. 2007. Pustaka Yustisia. Yogyakarta
- Tenda, V.S. Mirki, H. Sabijono., V.Z. Tirayoh. 2014. Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pemerintah Kota Manado Tahun 2010-2012. *Jurnal EMBA*. Vol.2 No.1
- Tulangow, A.P., T. Runtu. 2016. Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA*. Vol.4 No.3
- Undang–Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Menteri Dalam Negeri
- Widjajanta, B., Widyaningsih, A., & Tanuatmodjo, H. (2014). *Ekonomi dan Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*, 20–22. CV Citra Praya
- Nagabiru86's. 2012. Data Sekunder dan Data Primer.
[\(https://www.google.com.id/amp/s/nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/](https://www.google.com.id/amp/s/nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/), diakses 09 Januari 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI
NOMOR : 4 Tahun 2016
TANGGAL :

PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2015 DAN 2014

(dalam rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2015	Realisasi		
				Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1)	7.130.000.000,00	7.340.370.536,00	102,95	6.071.708.609,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2)	19.802.406.960,00	15.557.657.681,00	78,56	13.393.457.919,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3)	5.050.000.000,00	3.387.902.299,67	67,09	2.912.293.695,00
6	Lain-lain PAD yang sah	5.1.1.1.4)	23.875.079.794,00	22.928.869.762,77	96,04	12.619.631.221,63
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)		55.857.486.754,00	49.214.800.279,44	88,11	34.997.091.444,63
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1)				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1)(a)	20.838.809.000,00	15.662.422.850,00	75,16	16.743.036.957,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1)(b)	3.658.065.000,00	2.505.549.234,00	68,49	3.053.317.160,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1)(c)	526.156.287.000,00	526.156.286.000,00	100,00	480.887.270.476,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1)(d)	172.523.740.000,00	172.525.530.000,00	100,00	50.131.700.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 + 14)		723.176.901.000,00	716.849.788.084,00	99,13	550.815.324.593,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2)				
18	Dana Otonomi Khusus		-	-		-
19	Dana Penyesuaian		127.626.512.000,00	108.703.602.000,00	85,17	117.305.580.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (18 + 19)		127.626.512.000,00	108.703.602.000,00	85,17	117.305.580.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	5.1.1.2.3)				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah	5.1.1.2.3)a)	24.747.545.251,00	27.551.015.155,02	111,33	22.551.907.155,18
24	Pendapatan BANTUAN KEUANGAN dari Pemprov/sulsel	5.1.1.2.3)b)	9.488.889.600,00	11.488.889.600,00	121,08	10.838.922.520,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 + 24)		34.236.434.851,00	39.039.904.755,02	114,03	33.390.829.675,18
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)		885.039.847.851,00	864.593.294.839,02	97,69	701.511.734.268,18
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
30	Pendapatan Hibah		5.750.716.000,00	5.659.513.450,00	98,41	606.155.500,00
31	Pendapatan Dana Darurat					
32	Pendapatan Lainnya		-	394.778.079,00		-
33	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (30 s.d 32)		5.750.716.000,00	6.054.291.529,00	105,28	606.155.500,00
34						
35	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 33)		946.648.050.605,00	919.862.386.647,46	97,17	737.114.981.212,81
36						
37	BELANJA	5.1.2				
38	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
39	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1)	447.469.856.173,00	418.177.792.457,00	93,45	381.776.757.526,00
40	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2)	211.644.602.455,00	176.027.294.250,00	83,17	131.945.934.820,00
41	Belanja Bunga					
42	Belanja Subsidi					
43	Belanja Hibah	5.1.2.1.3)	3.137.764.000,00	2.773.000.000,00	88,38	7.284.242.800,00
44	Bantuan Sosial	5.1.2.1.4)	597.500.000,00	79.000.000,00	13,22	4.138.332.306,00
45	Bantuan Keuangan					
46	Jumlah Belanja Operasi (39 s.d 45)		662.849.722.628,00	597.057.086.707,00	90,07	525.145.267.452,00
47						
48	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
49	Belanja Tanah	5.1.2.2.1)	1.076.991.500,00	122.119.500,00	11,34	100.756.000,00
50	Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2)	28.691.718.275,00	26.322.087.470,00	91,74	16.122.822.340,00
51	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3)	81.083.984.200,00	83.751.401.877,00	103,29	28.742.475.337,00
52	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4)	209.120.797.999,00	147.720.077.088,00	70,64	69.034.650.780,00
53	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5)	4.016.700.000,00	8.480.000,00	0,21	218.688.000,00
54	Belanja Aset Lainnya		-	-		-
55	Jumlah Belanja Modal (49 s.d 54)		323.990.191.974,00	257.924.165.935,00	79,61	114.219.392.457,00
56						
57	BELANJA TAK TERDUGA					
58	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3	750.000.000,00	-	-	1.205.497.250,00
59	Jumlah Belanja Tak Terduga (58)		750.000.000,00	-	-	1.205.497.250,00
60						
61	TRANSFER					

No	Uraian	Ref	Anggaran 2015	Realisasi		
				Realisasi 2015	%	Realisasi 2014
1	2	3	4	5	6	7
62	TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE DESA					
63	Bagi Hasil Pajak ke Desa	5.1.3.2	-	-		-
64	Bagi Hasil Retribusi ke Desa		48.294.815.800,00	48.128.912.255,00	99,66	16.194.980.147,00
65	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa		-	-		-
66	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Desa (63 s.d 65)		48.294.815.800,00	48.128.912.255,00	99,66	16.194.980.147,00
67						
68	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (46 + 55 + 59 + 66)		1.035.884.730.402,00	903.110.164.897,00	87,18	656.765.137.306,00
69						
70	SURPLUS/DEFISIT (35- 68)		(89.236.679.797,00)	16.752.221.750,46	(18,77)	80.349.843.906,81
71						
72	PEMBIAYAAN					
73	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1				
74	Penggunaan SILPA		74.376.015.716,00	72.342.856.917,08	97,27	24.851.212.438,27
75	Pencairan Dana Cadangan		-	-		-
76	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-		-
77	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-		-
78	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
79	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		25.000.000.000,00	-		75.699.251,00
80	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-		-
81	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-		-
82	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		-	-		-
83	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		-
84	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		662.460.055,00	41.202.933,00	6,22	-
85	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
86	Jumlah Penerimaan Pembiayaan (74 s.d 85)		100.038.475.771,00	72.384.059.850,08	72,36	24.926.911.689,27
87						
88	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2				
89	Pembentukan Dana Cadangan		-	-		-
90	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100,00	-
91	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		-	-		-
92	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
93	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		-	-		-
94	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		-	-		-
95	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		-	-		-
96	Pembayaran Kewajiban kepada Pihak Ketiga		801.795.974,00	-		32.048.474.974,00
97	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		-
98	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		-
99	Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		-
100	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan (89 s.d 99)		10.801.795.974,00	10.000.000.000,00	92,58	32.048.474.974,00
101	PEMBIAYAAN NETTO (86 - 100)		89.236.679.797,00	62.384.059.850,08	69,91	(7.121.563.284,73)
102						
103	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (70 + 101)	5.1.5	-	79.136.281.600,54		73.228.280.622,08

BUPATI / ENREKANG

MUSLIMIN BANDO

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN

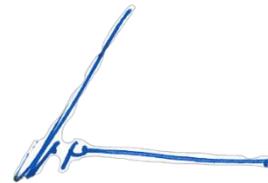
Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 dan 2015 (SETELAH AUDIT)

No.	Uraian	Reff	Anggaran	Realisasi (dalam rupiah)		Realisasi 2015
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	7.737.000.000	9.147.403.707	118,23	7.340.370.536,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.1	22.609.497.500	19.878.129.053	87,92	15.557.657.681,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	7.5.1.1.1	4.801.158.746,00	4.826.158.746,00	100,52	3.387.902.299,67
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.1	28.715.719.139	22.531.755.482	78,46	22.928.869.762,77
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		63.863.375.385	56.383.446.988	88,29	49.214.800.279,44
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA	7.5.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.1	14.863.804.000	16.948.689.099	114,03	15.662.422.850,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.2.1	5.452.163.000	7.846.379.393	143,91	2.505.549.234,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.2.1	543.890.364.000	543.890.364.000	100,00	526.156.286.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.2.1	334.521.984.200	264.434.758.356	79,05	172.525.530.000,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		898.728.315.200	833.120.190.848	92,70	716.849.788.084,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.2.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	7.5.1.2.2	103.327.631.000	103.327.631.000	100,00	108.703.602.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		103.327.631.000	103.327.631.000	100,00	108.703.602.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.3	27.214.361.296	31.381.322.861	115,31	27.551.015.155,02
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Bantuan Keuangan	7.5.1.2.3	8.004.012.827	7.320.710.427	91,46	11.488.889.600,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		35.218.374.123	38.702.033.288	109,89	39.039.904.755,02
27	Total Pendapatan Transfer		1.037.274.320.323	975.149.855.136	94,01	864.593.294.839,02
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3				
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.3	2.849.022.542	1.282.142.542	45,00	5.659.513.450,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.3	0,00	1.185.000	0,00	394.778.079,00
33	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		2.849.022.542	1.283.327.542	45,04	6.054.291.529,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.103.986.718.250	1.032.816.629.667	93,55	919.862.386.647,46
35						
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.4				
38	Belanja Pegawai	7.5.1.4	451.479.857.499	426.236.939.323	94,41	418.177.792.457,00
39	Belanja Barang	7.5.1.4	227.983.829.038	213.139.899.544	93,49	176.027.294.250,00
40	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	7.5.1.4	27.076.434.600	26.085.035.720	96,34	2.763.000.000,00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.4	500.000.000	47.000.000	9,40	89.000.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi		707.040.121.137	665.508.874.587	94,13	597.057.086.707,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.5				
47	Belanja Tanah	7.5.1.5	764.000.000	641.500.000	83,97	122.119.500,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.5	42.748.348.216	36.801.643.846	86,09	26.322.087.470,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.5	64.771.265.472	48.386.453.802	74,70	83.751.401.877,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5	294.040.820.636	243.778.683.369	82,91	147.720.077.088,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5	343.418.000	297.036.500	86,49	8.480.000,00
52	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal		402.667.852.324	329.905.317.517	81,93	257.924.165.935,00
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.6				
56	Belanja Tak Terduga	7.5.1.6	750.000.000	227.700.000	30,36	0,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		750.000.000	227.700.000	30,36	0,00
58	Jumlah Belanja		1.110.457.973.461	995.641.892.104	89,66	854.981.252.642,00
59						
60	TRANSFER	7.5.1.7				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.7.1				
62	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
66						
67	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.7.2				
68	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.7.2	94.882.849.000	94.879.163.447	99,99	48.128.912.255,00
69	Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.7.2	814.456.265	814.456.265	100,00	48.128.912.255,00
70	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		95.697.305.265	95.693.619.712	100,00	48.128.912.255,00
71	Jumlah Transfer		95.697.305.265	95.693.619.712	100,00	48.128.912.255,00
72	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.206.155.278.726	1.091.335.511.816	90,48	903.110.164.897,00
73						

No.	URAIAN	Reff	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi 2015
75						
76	PEMBIAYAAN	7.5.1.8				
77						
78	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.1				
79	Penggunaan SiLPA	7.5.1.8.1.a	79.566.060.862,00	75.981.714.116,54	95,50	72.342.856.917,08
80	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
81	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		34.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		0,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	7.5.1.8.1.b	750.000.000,00	41.868.555,00	5,58	41.202.933,00
91	Jumlah Penerimaan		114.316.060.862,00	76.023.582.671,54	66,50	72.384.059.850,08
92						
93	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.2				
94	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
95	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.1.8.2.a	11.282.142.542,00	11.282.142.542,00	100,00	10.000.000.000,00
96	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam		0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pemberian Pinjaman kepada		0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pemberian Pinjaman kepada		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah		865.357.844,00	0,00	0,00	0,00
105	Jumlah Pengeluaran		12.147.500.386,00	11.282.142.542,00	92,88	10.000.000.000,00
106	PEMBIAYAAN NETO		102.168.560.476,00	64.741.440.129,54	63,37	62.384.059.850,08
107						
108	Sisa Lebih Pembiayaan	7.5.1.9		6.222.557.980,99		79.136.281.600,54

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI Enrekang



Muslimin Bando

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 dan 2016

(SEBELUM AUDIT)

(dalam rupiah)

No.	URAIAN	Reff	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1				
3	Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.a	9.965.000.000,00	9.023.051.580,00	90,55	9.147.403.707,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.b	30.165.130.944,00	25.358.968.848,00	84,07	19.878.129.053,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.5.1.1.c	12.600.000.000,00	12.355.808.162,48	98,06	4.826.158.746,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	7.5.1.1.d	83.421.960.638,00	53.376.386.128,07	63,98	22.531.755.482,95
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		136.152.091.582,00	100.114.214.718,55	73,53	56.383.446.988,95
8						
9	PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	7.5.1.2.1				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.1.a	17.628.988.184,00	13.136.161.539,00	74,51	16.948.689.099,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.5.1.2.1.b	6.440.104.421,00	3.797.817.438,00	58,97	7.846.379.393,00
13	Dana Alokasi Umum	7.5.1.2.1.c	534.335.959.000,00	534.335.959.000,00	100,00	543.890.364.000,00
14	Dana Alokasi Khusus	7.5.1.2.1.d	229.688.040.000,00	213.747.024.586,00	93,06	264.434.758.356,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		788.093.091.605,00	765.016.962.563,00	97,07	833.120.190.848,00
16						
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	7.5.1.2.2				
18	Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dana Penyesuaian	7.5.1.2.2.a	89.128.443.000,00	89.128.442.000,00	100,00	103.327.631.000,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya		89.128.443.000,00	89.128.442.000,00	100,00	103.327.631.000,00
21						
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	7.5.1.2.3				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	7.5.1.2.3.a	32.874.681.408,00	36.068.762.539,00	109,72	31.381.322.861,50
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		5.134.490.600,00	3.997.912.000,00	0,00	7.320.710.427,00
25	Pendapatan Bantuan Keuangan	7.5.1.2.3.b	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
26	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi		38.009.172.008,00	40.066.674.539,00	105,41	38.702.033.288,50
27	Total Pendapatan Transfer		915.230.706.613,00	894.212.079.102,00	97,70	975.149.855.136,50
28						
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3				
30	Pendapatan Hibah	7.5.1.3.a	6.336.630.000,00	6.527.246.258,00	103,01	1.282.142.542,00
31	Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
32	Pendapatan Lainnya	7.5.1.3.b	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
33	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah		6.336.630.000,00	6.527.246.258,00	103,01	1.283.327.542,00
34	JUMLAH PENDAPATAN		1.057.719.428.195,00	1.000.853.540.078,55	94,62	1.032.816.629.667,45
35						
36	BELANJA					
37	BELANJA OPERASI	7.5.1.4				
38	Belanja Pegawai	7.5.1.4.a	391.499.847.204,00	369.600.973.631,00	94,41	426.236.939.323,00
39	Belanja Barang	7.5.1.4.b	276.627.152.938,00	266.957.030.483,00	96,50	213.139.899.544,00
40	Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
41	Subsidi		928.656.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Hibah	7.5.1.4.c	37.707.674.316,00	31.716.827.325,00	84,11	26.085.035.720,00
43	Bantuan Sosial	7.5.1.4.d	745.000.000,00	206.500.000,00	27,72	47.000.000,00
44	Jumlah Belanja Operasi		707.508.330.458,00	668.481.331.439,00	94,48	665.508.874.587,00
45						
46	BELANJA MODAL	7.5.1.5				
47	Belanja Tanah	7.5.1.5.a	780.000.000,00	548.080.000,00	70,27	641.500.000,00
48	Belanja Peralatan dan Mesin	7.5.1.5.b	31.540.250.748,00	28.871.268.774,00	91,54	36.801.643.846,00
49	Belanja Gedung dan Bangunan	7.5.1.5.c	63.212.601.453,00	44.110.599.986,00	69,78	48.386.453.802,00
50	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.1.5.d	143.653.270.117,00	126.522.778.285,00	88,08	243.778.683.369,00
51	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.5.1.5.e	35.750.000,00	35.750.000,00	100,00	297.036.500,00
52	Belanja Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah Belanja Modal		239.221.872.318,00	200.088.477.045,00	83,64	329.905.317.517,00
54						
55	BELANJA TAK TERDUGA	7.5.1.6				
56	Belanja Tak Terduga	7.5.1.6	250.000.000,00	70.050.000,00	28,02	227.700.000,00
57	Jumlah Belanja Tak Terduga		250.000.000,00	70.050.000,00	28,02	227.700.000,00
58	Jumlah Belanja		946.980.202.776,00	868.639.858.484,00	91,73	995.641.892.104,00
59						
60	TRANSFER	7.5.1.7				
61	TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA	7.5.1.7.1				
62	Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00
63	Bagi Hasil Retribusi		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
66						
67	TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN	7.5.1.7.2				
68	Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.1.7.2.a	0,00	0,00	99,99	94.879.163.447,00
69	Bantuan Keuangan ke Desa	7.5.1.7.2.b	147.013.230.800,00	119.466.976.818,00	81,26	0,00
70	Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.1.7.2.c	648.552.800,00	648.552.800,00	100,00	814.456.265,00
71	Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan		147.661.783.400,00	120.115.529.618,00	81,35	95.693.619.712,00
72	Jumlah Transfer		147.661.783.400,00	120.115.529.618,00	81,35	95.693.619.712,00
73	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.094.641.986.176,00	988.755.388.102,00	90,33	1.091.335.511.816,00
74						
75	SURPLUS/DEFSIT		(36.922.557.981,00)	12.098.151.976,55	(32,77)	(58.518.882.148,55)

No.	URAIAN	Reff	Anggaran 2017	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016
76						
77	PEMBIAYAAN	7.5.1.8				
78						
79	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.1				
80	Penggunaan SILPA	7.5.1.8.1.a	6.222.557.981,00	6.221.468.702,99	99,98	75.981.714.116,54
81	Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
82	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
83	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
84	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
85	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		43.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
86	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
87	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
88	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
89	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
90	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
91	Penerimaan Kembali Pinjaman angsuran Berjangka	7.5.1.8.1.b	100.000.000,00	14.564.274,00	14,56	41.868.555,00
92	Jumlah Penerimaan		49.322.557.981,00	6.236.032.976,99	12,64	76.023.582.671,54
93						
94	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.1.8.2				
95	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
96	Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	7.5.1.8.2.a	12.000.000.000,00	12.000.000.000,00	100,00	11.282.142.542,00
97	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
98	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
100	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi		0,00	0,00	0,00	0,00
102	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
103	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara		0,00	0,00	0,00	0,00
104	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
105	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		400.000.000,00	0,00	0,00	
106	Jumlah Pengeluaran		12.400.000.000,00	12.000.000.000,00	96,77	11.282.142.542,00
107	PEMBIAYAAN NETO		36.922.557.981,00	(5.763.967.023,01)	-15,61	64.741.440.129,54
108						
109	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	7.5.1.9		6.334.184.953,54		6.222.557.980,99

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

BUPATI ENREKANG



MUSLIMIN BANDO



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 013/05/C.4-II/III/39/2018
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Makassar, 25 Rajab 1439 H
12 April 2018 M

Kepada Yth.
Ketua LP3M Unismuh Makassar

di-
Makassar

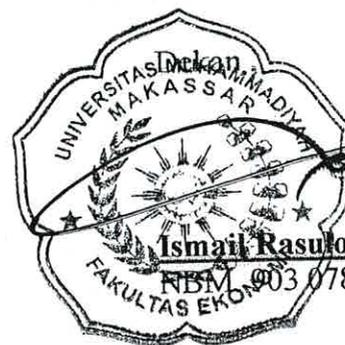
Dengan hormat,

Dalam rangka proses penelitian dan penulisan skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **Rusdi**
Stambuk : **105730470814**
Jurusan : **Akuntansi**
Judul Penelitian : **Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang**

Dimohon kiranya mahasiswa tersebut dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai tempat mahasiswa tersebut melakukan penelitian.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.



Ismail Rasulong, SE.,MM
NBM 03078,-

Tembusan :

1. Rektor Unismuh Makassar
2. Ketua Jurusan
3. Mahasiswa Ybs.
4. Arsip



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 312/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018

26 Rajab 1439 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

12 April 2018 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak / Ibu Bupati Enrekang

Cq. Ka. Kantor Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu
di -

Enrekang

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 013/05/C.4-II/III/39/2018 tanggal 12 April 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RUSDI**

No. Stambuk : **10573 04708 14**

Fakultas : **Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Jurusan : **Akuntansi**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 April 2018 s/d 14 Juni 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NBM 101 7716



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal Sudirman Km. 3 Pinang Enrekang Telp/Fax (0420)-21079
ENREKANG

Enrekang, 24 April 2018

Kepada

Nomor : 190/DPMPTSP/IP/IV/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Yth. 1. Kepala DPKAD Enrekang
2. Kabag Aset Setda Enrekang
Di

Kec. Enrekang.

Berdasarkan Surat Dari Ketua LP3M Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 312/Izn-5/C.4-VIII/IV/37/2018, tanggal 12 April 2018 menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **Rusdi**
Tempat Tanggal Lahir : Madata, 17 Mei 1995
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Madata Desa Lunjeng Kec. Buttu Batu

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul: **"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang."**

Dilaksanakan mulai, 24 April 2018 s/d 24 Juni 2018.

Pengikut/anggota: -

Pada prinsipnya dapat menyetujui kegiatan tersebut diatas dengan ketentuan:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Pemerintah/Instansi setempat.
2. Tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan.
3. Mentaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas foto copy Skripsi kepada Bupati Enrekang Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang.

Demikian untuk mendapat perhatian.

a.n. BUPATI ENREKANG

Kepala DPM PTSP Kab. Enrekang



HARWAN SAWATI, SE

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19670329 198612 1 001

Tembusan Yth :

01. Bupati Enrekang (Sebagai Laporan).
02. Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Enrekang.
03. Kepala BAKESBANG POI Kab. Enrekang



PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
(B P K D)

Jalan Jend.Sudirman No.10 Telp.(0420) 21086 Fax.21921

E N R E K A N G

91712

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 79/VI/BPKD/2018

Berdasarkan surat Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 190/DPMPTSP/IP/IV/2018, tanggal 24 April 2018 perihal Izin Penelitian, maka yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Rusdi
Tempat Tgl Lahir : Madata, 17 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Madata Desa Lunjen Kec. Buttu Batu

benar telah melakukan Penelitian pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Enrekang sejak tanggal 24 April 2018 s/d 24 Juni 2018 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul **"Analisis Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang"**.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Enrekang, 25 Juni 2018

An. KEPALA BPKD
SEKRETARIS

= H. SUDIRMAN TARAKKA, SE =

Pangkat : Pembina

NIP : 19600803 198503 1 020

RIWAYAT HIDUP



Rusdi, lahir di Madata kec. Buntu Batu Kab. Enrekang pada tanggal 17 Mei 1995. Anak ke-7 dari 7 bersaudara yang merupakan buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Lanasi dengan Ibunda Shiba, penulis memulai pendidikan Sekolah Dasar di SDK Madata dan tamat pada tahun 2008. Setelah tamat Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan sekolahnya di SMP Negeri 2 Baraka dan tamat pada tahun 2011. Kemudian setelah tamat disekolah menengah pertama, penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pasui dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi pada tahun 2018.

Selama menjalani status sebagai seorang mahasiswa, penulis aktif diberbagai organisasi kemahasiswaan yaitu, Lembaga Dakwah Kampus Lembaga Pembinaan dan Kajian Spiritual Mahasiswa (LDK-LPKSM Makassar) yakni sebuah Lembaga Dakwah Kampus yang berada dibawah koordinasi Lingkar Dakwah Mahasiswa Indonesia (LIDMI) dan penulis juga aktif di organisasi Forum Daerah Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim Massenrempulu (FKM3 Enrekang) yakni sebuah organisasi yang berfungsi untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari Enrekang dengan berbagai kegiatan keislaman baik di Makasasr maupun di Enrekang. Selain berorganisasi penulis juga menghabiskan masa-masa perkuliahannya dengan kegiatan pengembangan diri seperti Tarbiyah, Taklim, Kursus Bahasa Inggris dan berbagai kegiatan lain yang menunjang kemampuan pada profesi Akuntansi.